



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



@komisiinformasijawabarat



**Laporan Tahunan Komisi Informasi
Provinsi Jawa Barat**

**Penulis :
Tim Penulis Laporan Tahunan**

**Komisi Informasi
Provinsi Jawa Barat
Jl. Turangga No. 25 Bandung**

Telp. : (022) 73511656

Whatsapp : 08112314088

Email : kipjabar@jabarprov.go.id

Website : <https://komisiinformasi.jabarprov.go.id/>



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas terhadap Pemerintah dan Masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat seperti yang diamatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 mencakup informasi yang dilaksanakan mulai Januari sampai Oktober Tahun 2023. Data yang dihimpun dalam laporan ini merupakan data yang didapatkan dari Kegiatan Bidang Kelembagaan, Bidang Asistensi dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), serta Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Laporan Tahunan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kinerja Komisi Informasi Jawa Barat berupa kegiatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan selama tahun 2023 serta berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan tersebut. Kami berharap Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dalam mendorong peningkatan kualitas implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat untuk tahun-tahun berikutnya.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak, masyarakat Jawa Barat, yang telah memberikan dukungan, sehingga Komisi Informasi Jawa Barat dapat menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik, khususnya kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Ketua bersama seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Sekretaris Daerah bersama seluruh jajarannya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kepala bersama seluruh Jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Kami pun memohon maaf jika dalam menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masih banyak kekurangan. Semoga tahun berikutnya dapat menjadi lebih baik. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Ijang Faisal

DAFTAR ISI

2	Kata Pengantar
7	Tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
10	Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
12	Visi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
13	Misi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
14	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
15	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
20	Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi
20	Tahap Pendaftaran/Pengajuan PSI
22	Tahap Pasca Registrasi
24	Keberatan atas Putusan Komisi Informasi
25	Pencapaian Target Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
28	Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE)
29	Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik
31	Publikasi Media TV, Media Radio, Media Cetak, dan Online
36	Monitoring Evaluasi berbasis Elektronik (e-MONEV) Penerapan Keterbukaan Informasi Publik
38	Parameter dan Pembobotan
39	Objek/Peserta Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
40	Tahapan dan Penilaian
42	Penilaian dan Penetapan
48	Pengumuman dan Penganugerahaan

49	Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Jawa Barat
50	Kelompok Kerja Daerah Jawa Barat (POKJADA)
51	Informan Ahli Daerah Jawa Barat
51	Capaian Kegiatan
57	Kegiatan Apresiasi Desa
61	Pencapaian Kegiatan Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi
63	Bidang Kelembagaan
64	Penguatan Kelembagaan
70	Peningkatan Kapasitas SDM Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
70	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Lain dengan Menjadi Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
72	Kerjasama dengan Lembaga Lain
73	Pencapaian Target Bidang Kelembagaan
73	Bidang Asistensi dan PPID
74	Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
77	Kegiatan Asistensi Penerapan Keterbukaan Informasi
79	Pencapaian Target Bidang Asistensi dan PPID
81	Penutup

“Kalau bersih kenapa
harus risih?”

Tentang

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

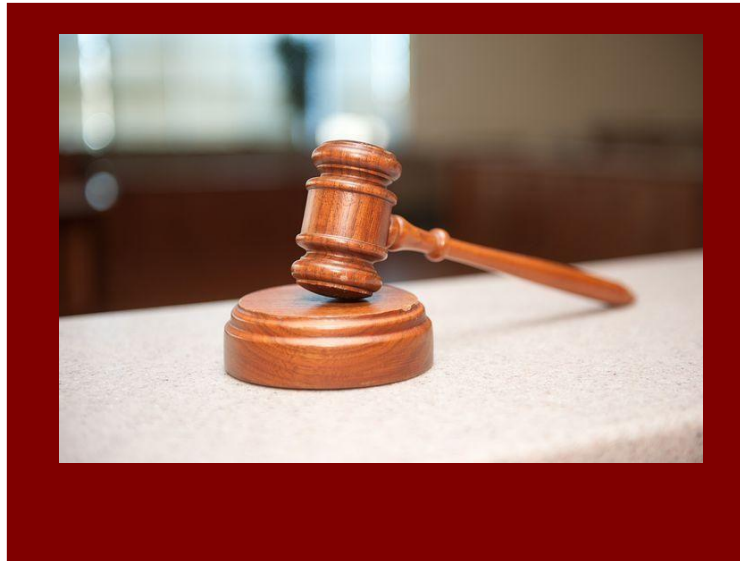
Keterbukaan Informasi Publik merupakan pondasi penting bagi suatu negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang *good governance*, terbuka, transparan, dan akuntabel, sehingga memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ikut menentukan kebijakan publik. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik dan partisipasi publik terhadap penyelenggara Pemerintahan dan badan publik lainnya yang menggunakan anggaran negara, baik itu APBN maupun APBD. Keterbukaan informasi publik juga memberikan energi baru bagi penyelenggaraan negara yang lebih baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat turut serta secara aktif dalam setiap proses pemutusan kebijakan publik.

Penerapan keterbukaan Informasi publik di Indonesia diawali dengan adanya salah satu produk hukum Indonesia pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pengesahan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi yang terjadi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara di Indonesia.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai lembaga yang lahir karena Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi dituntut untuk menjadi barometer dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan

Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”.



Untuk menjalankan fungsi dari Komisi Informasi, Undang-undang Keterbukaan Informasi memandatkan tugas yang dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU KIP sebagai berikut;

Komisi Informasi bertugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;*
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan*
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.*

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel

serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Komisioner

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2019 - 2023 dikukuhkan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, tanggal 31 Desember 2019 bertempat di Aula Timur Gedung Sate. Di tempat dan tanggal yang sama, dilakukan pula agenda serah terima jabatan dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2015 - 2019 kepada Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2023. Berikut Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2023

- **Ijang Faisal**

Ketua Komisi Informasi
Periode 2019 - 2023



- **Dedi Dharmawan**

Wakil Ketua Komisi Informasi
Periode 2019 - 2023



- **Husni Farhani Mubarak**

Komisioner Bidang
Penyelesaian Sengketa
Informasi (PSI) Periode 2019 -
2023



- **Yudaningsih**

Komisioner Bidang Asistensi
dan PPID Periode 2019 - 2023



- **Dadan Saputra**

Komisioner Bidang Advokasi,
Sosialisasi, dan Edukasi (ASE)
Periode 2019 - 2023



Visi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Melalui Komisi Informasi Jawa Barat yang Mandiri dan Berkeadilan Menuju Jawa Barat Juara Lahir dan Batin”

Misi

Komisi Informasi

Provinsi Jawa Barat

- Meningkatkan Kesadaran Kritis Masyarakat Jawa Barat agar mampu mengakses dan pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan informasi menggunakan informasi secara bertanggungjawab serta aktif berpartisipasi dalam proses
- Memperkuat Kelembagaan Komisi Informasi Jawa Barat melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan
- Mengoptimalkan Kualitas Kebijakan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana
- Membangun Kemitraan dengan *stakeholders* demi mengakselerasi masyarakat informasi Menuju Jawa Barat Juara Lahir dan Batin
- Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik

Bidang PSI

Penyelesaian Sengketa Informasi

Bidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab bidang ini adalah pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik dan peningkatan kualitas layanan penyelesaian sengketa informasi publik.



Foto 1. Suasana Persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang di laksanakan di Kantor

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diberikan wewenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Barat. Bidang PSI ini merupakan jantung dari Komisi Informasi, dengan tugas utama Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu (1) melaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik secara cepat, biaya ringan, terbuka, dan sederhana; (2) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut adalah Laporan Penyelesaian Sengketa Informasi pada Tahun 2023;

• Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Pada kurun waktu Januari sampai Oktober 2023, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima pendaftaran pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi sebanyak 146 sengketa (selanjutnya disebut pengajuan PSI) sebagaimana dapat dilihat pada Diagram 1. Jumlah permohonan informasi tahun ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (per Oktober 2022) ada sebanyak 168 pengajuan PSI.

Diagram 1.
Data Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Bulan Januari – Oktober Tahun 2023

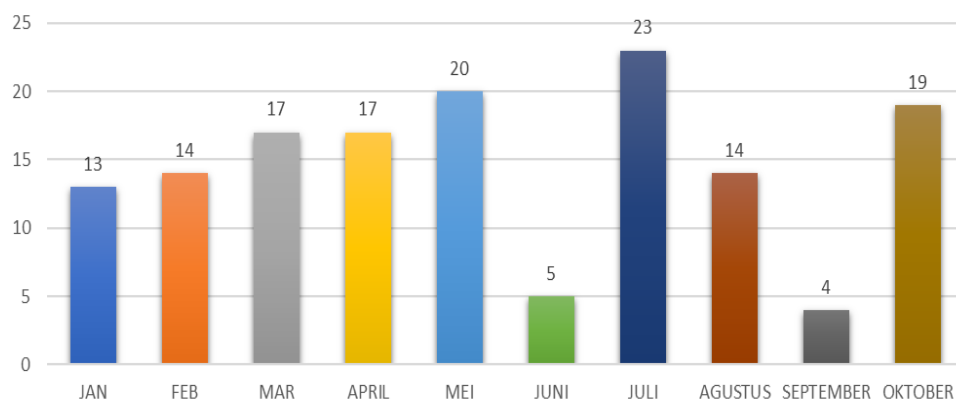
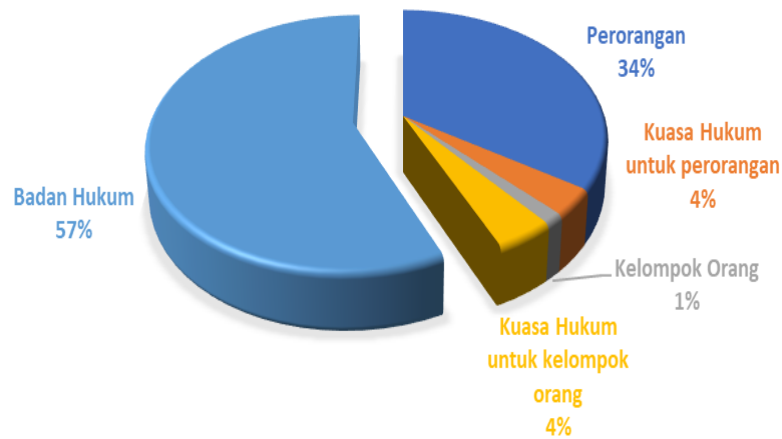


Diagram 1 memperlihatkan bahwa Jumlah Pengajuan PSI ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat paling banyak berada pada bulan Juli 2023, yaitu sebanyak 23 Pengajuan PSI.

Selanjutnya Diagram 2 dan Tabel 1 menunjukkan persentase Pemohon berdasarkan identitasnya. Pemohon pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 ini didominasi oleh Pemohon dengan identitas Badan Hukum yaitu sebanyak 57% atau 83 Pengajuan PSI.

Diagram 2
Data Jumlah Pemohon PSI berdasarkan identitas
Januari – Oktober Tahun 2023



Tabel 1
Kelompok Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi 2023
Januari – Oktober Tahun 2023

No	Identitas Pemohon	Jumlah
1	Perorangan	50
2	Kuasa Hukum untuk perorangan	5
3	Kelompok Orang	2
4	Kuasa Hukum untuk kelompok orang	6
5	Badan Hukum	83
Jumlah		146

Tabel 2 di bawah ini menunjukkan hal yang menjadi alasan Pemohon dalam pengajuan PSI ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dapat terlihat bahwa Pemohon tidak mendapat tanggapan keberatan dari Atasan PPID Badan Publik merupakan alasan paling banyak. Oleh karena itu, hal itu dapat diartikan masih banyaknya Badan Publik yang belum memahami dan/atau menerapkan kewajiban mereka untuk memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan Pemohon Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Tabel 2.

Alasan Pemohon Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi
Ke Komisi Informasi Jawa Barat Januari – Oktober Tahun 2023

No.	Alasan Pengajuan	Jumlah
1	Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17 UU KIP	2
2	Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 UU KIP	4
3	Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon	98
4	Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas Keberatan	34
5	Pengenaan biaya yang tidak wajar	0
6	Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP	0
7	alasan point 2 & 4 di atas	1
8	alasan point 2 & 3 di atas	7
Jumlah		146

Adapun Badan Publik yang paling banyak diajukan sebagai Termohon dalam sengketa informasi sepanjang Januari hingga Oktober Tahun 2023 adalah Pemerintah Daerah. Tercatat sebanyak 61 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan Termohon kategori Badan Publik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Jumlah Badan Publik sebagai Termohon
Januari – Oktober Tahun 2023

No	Jenis Badan Publik	Jumlah
1	BUMD/BUMN	1
2	Kementerian (Institusi Vertikal)	6
3	Lembaga Negara	4
4	Non Pemerintah	1
5	Pemerintah Daerah	61
6	Pemerintah Desa	25
7	RSUD	1
8	Sekolah/Lembaga Pendidikan	47
Jumlah		146

Tabel 4. merupakan sebaran lingkup wilayah Badan Publik yang menjadi Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Dari 146 penyelesaian sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi, angka paling banyak adalah wilayah Kabupaten Bekasi dengan jumlah 29 sengketa dan Kabupaten Indramayu dengan Jumlah 19 sengketa.

Tabel 4.
Ruang Lingkup Wilayah Termohon PSI
Januari - Oktober Tahun 2023

No	Lingkup Wilayah	Jumlah
1	Kabupaten Bandung	8
2	Kabupaten Bandung Barat	1
3	Kabupaten Bekasi	29
4	Kabupaten Bogor	16
5	Kabupaten Ciamis	1
6	Kabupaten Cianjur	5
7	Kabupaten Cirebon	2
8	Kabupaten Garut	11
9	Kabupaten Indramayu	19

10	Kabupaten Karawang	2
11	Kabupaten Kuningan	2
12	Kabupaten Sukabumi	2
13	Kabupaten Sumedang	6
14	Kota Bandung	3
15	Kota Bekasi	13
16	Kota Bogor	5
17	Kota Cimahi	1
18	Kota Cirebon	1
19	Kota Depok	3
20	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4
21	Badan Publik Pusat/Vertikal	9
22	Lain-lain	3
Jumlah		146

Terkait informasi yang dimohon Pemohon sehingga menjadi sengketa informasi untuk diselesaikan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, jika dikelompokkan berkisar pada lima jenis kategori informasi publik seperti tercantum dalam Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5.
Informasi Publik yang Dimohonkan Pemohon
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Januari - Oktober 2023

No.	Kategori Informasi yang dimohonkan	Jumlah
1	Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik	63
2	Informasi tentang Anggaran, Data Perbendaharaan, Inventaris, Laporan Keuangan dan kinerja dalam lingkup Badan Publik	108
3	Informasi surat Pimpinan, Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak bagi Publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik	11

4	Informasi Perizinan, Proyek, Barang dan Jasa dan Perjanjian Pihak Ketiga	25
5	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat (ex: arsip kepemilikan tanah, dll)	18
Jumlah		225

Data Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa Informasi tentang Anggaran, Data Perbendaharaan, Inventaris, Laporan Keuangan dan kinerja dalam lingkup Badan Publik merupakan informasi yang mendominasi permohonan informasi Pemohon ke Badan Publik.

• Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Tahap Pendaftaran/Pengajuan PSI

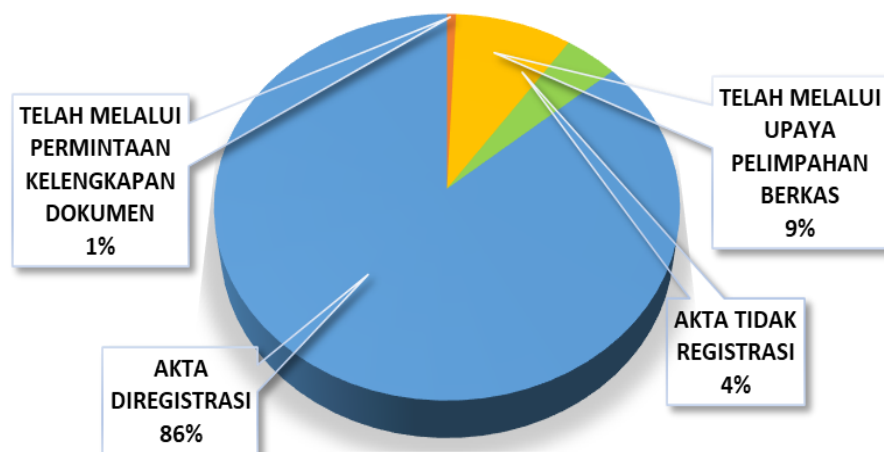
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memberikan upaya pelayanan kepada seluruh pendaftaran pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu sebanyak 146 upaya pelayanan dari 146 pendaftaran (pengajuan PSI). Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan penerimaan dan proses identifikasi administrasi. Dari upaya identifikasi kelengkapan berkas pendaftaran ditemukan kondisi bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, sehingga tidak semua pendaftaran atau pengajuan PSI pada tahun 2023 dapat lanjut untuk diselesaikan melalui tahapan persidangan adjudikasi dan/atau mediasi.

Dari 146 pengajuan PSI selama Januari-Oktober 2023, terdapat 6 (enam) sengketa didapatkan keluar akta tidak registrasi dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, di antaranya yaitu dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum sebagai Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan, yaitu

Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

Sampai saat laporan ini tersusun (Oktober 2023), terdapat 1 (satu) sengketa yang masih dalam tahap proses administrasi menunggu kelengkapan dokumen dan 13 (tiga belas) sengketa yang tertunda karena teridentifikasi merupakan pengajuan dari Pemohon yang diyakini oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memiliki *conflict of interest* dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Walaupun begitu, Komisi informasi Provinsi Jawa Barat tetap berupaya menjamin kepastian hukum dengan melakukan pelimpahan berkas sengketa ke Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu Komisi Informasi Provinsi dapat meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Provinsi tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya dan Lainnya, ada sebanyak 126 pengajuan PSI yang telah diregistrasi dan mendapatkan akta Registrasi.

Diagram 3
Status Hasil Identifikasi dan Pemeriksaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Sebagai Bagian Pelayanan di Tahap Pendaftaran



2. Tahap Pasca Registrasi

Sepanjang tahun 2023 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan akta registrasi sebanyak 126 register, tetapi pemohon yang mengajukan pencabutan permohonan PSI sebanyak 9 register dengan terbit akta batal register. Oleh karena itu, jumlah sengketa yang diselesaikan lebih lanjut ada sebanyak 117 register.

Selain itu, pada tahun 2023, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga masih menyisakan sengketa yang teregister pada tahun 2022 yang belum terselesaikan hingga putusan dengan jumlah 69 Register, sehingga total, terdapat 186 register untuk disidangkan/diselesaikan.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya penyelesaian terhadap sengketa teregistrasi dengan melakukan persidangan pada Tahun 2023 sebanyak 138 Register sebagaimana pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6
Upaya Penyelesaian Register Sengketa
Melalui Persidangan Komisi Informasi Jawa Barat
Januari - Oktober 2023

No.	Upaya Penyelesaian	Register 2022	Register 2023	Jumlah
1	Telah disidangkan	50	88	138
2	<i>Waiting list</i> ke agenda persidangan	19	29	48
Total				186

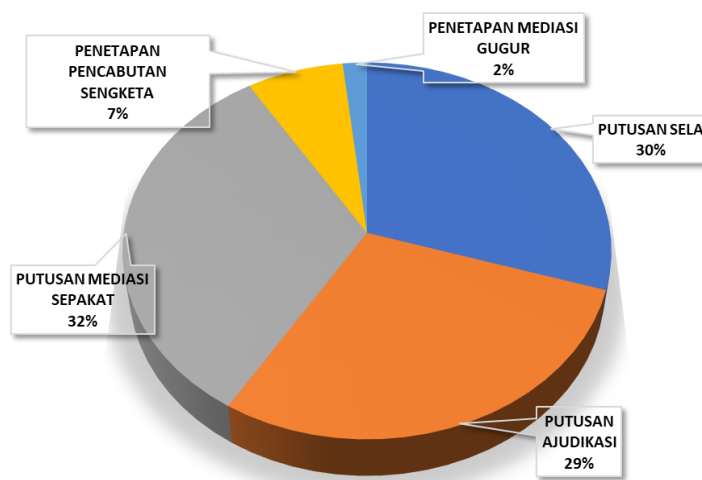
Dari upaya persidangan yang telah dilakukan Komisi Informasi Jawa Barat, terdapat sebanyak 114 register dinyatakan sengketa telah selesai (case closed) sebagaimana dapat dilihat dari hasil penyelesaian register sengketa selama periode penyelesaian sengketa per Oktober 2023 pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7.
 Hasil Penyelesaian Register Sengketa
 Hingga Oktober 2023

No	Hasil Persidangan	Jumlah
1	Keluar Putusan Sela	34
2	Keluar Putusan Ajudikasi	33
3	Keluar Putusan Mediasi (Sepakat)	37
4	Keluar Penetapan Pencabutan Sengketa	8
5	Keluar Penetapan Mediasi Gugur	2
Jumlah		114

Sebagaimana Diagram yang diperlihatkan pada Diagram 4, sebagian besar putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah putusan hasil mediasi sepakat, putusan sela dan putusan ajudikasi yaitu masing masing 32.5% , 30% dan 29% atau sebanyak 37, 34 dan 33 putusan.

Diagram 4
 Hasil Penyelesaian Register Sengketa Komisi Informasi



3. Keberatan Atas Putusan Komisi Informasi

Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Per-KI PPSIP dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 menjadi dasar hukum bagi para pihak untuk dapat melakukan upaya mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat apabila pihak Pemohon ataupun Termohon menilai tidak puas terhadap hasil putusan yang dikeluarkan Komisi Informasi Jawa Barat. Upaya keberatan terhadap Putusan Komisi Infotrmasi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) ataupun Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Usaha (PTUN) Bandung sesuai dengan kedudukan Termohon yang disengketakan.

Sepanjang tahun 2023 (Januari - Oktober) terdapat 4 (empat) putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang telah diajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung sebagaimana **Tabel 8** di bawah ini.

Tabel 8.

Keberatan Atas Putusan Komisi Informasi Jawa Barat PTUN

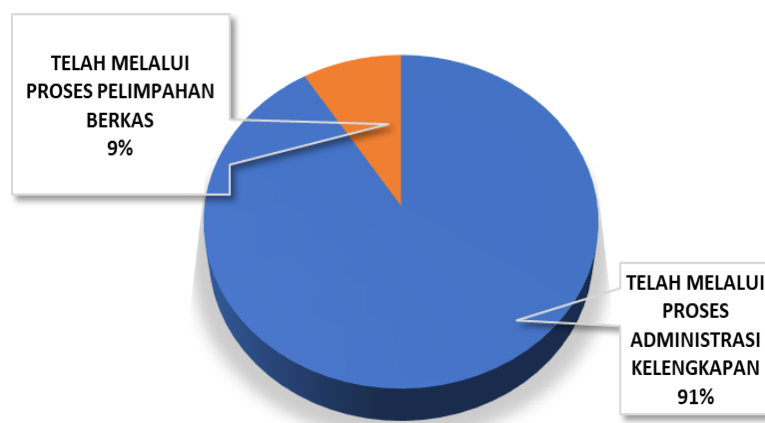
No	Nomor Perkara	Tgl Register (Ptun)	Status Perkara (Per Okt 2023)
1	72/G/KI/2023/PTUN.BDG	7 Juli 2023	Penyerahan Memori Kasasi
2	33/G/KI/2023/PTUN.BDG	16 Maret 2023	Pengiriman Berkas Kasasi
3	38/G/KI/2023/PTUN.BDG	29 Maret 2023	Minutasi
4	63/G/KI/2023/PTUN.BDG	19 Juni 2023	Minutasi

Adapun hasil putusan PTUN Bandung yaitu menyatakan menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terhadap 3 (tiga) Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan satu lainnya belum teridentifikasi.

- **Pencapaian Target Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

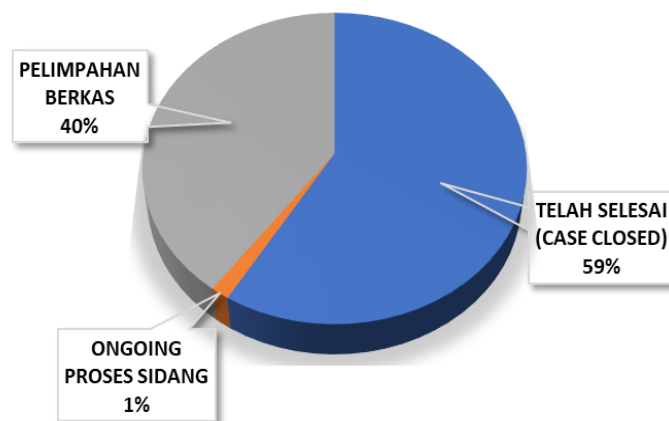
Dari 146 Pendaftaran Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya pelayanan penyelesaian sengketa. Upaya pelayanan yang dilakukan pada proses pendaftaran adalah dengan melakukan penerimaan dan proses identifikasi sesuai dengan regulasi/prosedur yang berlaku. Sebanyak 113 sengketa telah dilakukan tahapan pemeriksaan dokumen kelengkapan, sementara sisanya yaitu sebanyak 13 sengketa telah dilakukan upaya pelimpahan berkas ke Komisi Informasi Pusat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian upaya melayani pendaftaran adalah sebanyak 100 %.

Diagram 5
Upaya Pelayanan Pendaftaran Sengketa Informasi



Berdasarkan progres penyelesaian sengketa informasi publik selama tahun 2023 (Januari-Oktober), terdapat limpahan sengketa di tahun 2022 yang harus diselesaikan yaitu sebanyak 69 register. Sampai Laporan ini dibuat (Oktober 2023), terdapat 1 (satu) register (1%) yang belum diselesaikan karena masih berada pada tahapan persidangan dan rencananya akan diputuskan pada November 2023. Sementara itu, 41 register (59%) telah dinyatakan selesai (*case closed*) dan 28 register (40%) belum dapat diselesaikan oleh Majelis Komisioner di periode saat ini karena teridentifikasi merupakan pengajuan dari Pemohon yang diyakini oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memiliki *conflict of interest*.

Diagram 6
Status Register Tahun 2022 yang Diselesaikan Tahun 2023



Adapun jika dilihat dari proses penyelesaian permohonan Penyelesaian sengketa yang diregister untuk diselesaikan melalui persidangan pada tahun 2023 ada sebanyak 117 register. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengupayakan penyelesaian dengan dilaksanakannya persidangan pada tahun 2023 terhadap 136 register. Sehingga **capaian upaya persidangan mencapai 116%**. Angka ini melampaui target 100% penyelesaian PSI karena selain menyelesaikan sengketa teregister di tahun 2023 juga menyelesaikan sengketa limpahan dari tahun sebelumnya.



Foto 2. Suasana Persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di luar Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Sementara itu, pada tahun 2023 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan putusan dan/atau penetapan untuk 114 register dari 117 sengketa yang teregister di tahun 2023. sehingga, **capaian keluar putusan dan/atau penetapan di tahun 2023 adalah sebanyak 97%.**

Pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) Putusan atau 3.51 % dari seluruh putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan keberatan ke PTUN Bandung. Artinya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah melampaui target yang membatasi jumlah putusan yang diajukan keberatan ke pengadilan maksimal 25% dari seluruh putusan pada tahun berjalan.

Bidang ASE

Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi

Tugas Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) mencakup : (1) mendiseminasi UU KIP dan Peraturan Pelaksanaan lainnya ke Badan Publik; (2) melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Publik tentang fungsi dan peran KI Provinsi; (3) merancang dan melaksanakan model konsultasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara KI Provinsi dan Badan Publik di tingkat Provinsi.



Foto. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik (E-Monev) Tahun 2023

Sementara itu Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memiliki peran dalam melaksanakan advokasi, sosialisasi dan edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan Badan Publik. Peran ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui tata cara mengakses informasi publik pada Badan Publik, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Dengan adanya tata kelola yang baik dalam memberikan pelayanan informasi publik, maka masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi publik. Selain itu, Komisi Informasi juga mengetahui masalah-masalah atau kendala yang dihadapi masyarakat atau Lembaga-lembaga

kemasyarakatan dalam kaitannya dengan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik. Langkah-langkah advokasi, sosialisasi dan edukasi tersebut berguna untuk mempengaruhi dan mendorong masyarakat dan Badan Publik dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan Badan Publik untuk mencegah terjadinya salah tafsir atas ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Komisi Informasi. Selain itu kegiatan edukasi, sosialisasi, dan advokasi ini juga dapat mengakselerasi pelaksanaan UU KIP di badan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi, sehingga *demand* dan *supply* informasi akan bertemu secara seimbang.

- **Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik**

Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi bertujuan untuk mendorong semua elemen masyarakat agar dapat memahami keterbukaan informasi dan kedudukannya sebagai pemohon informasi yang diamanahkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta mendorong agar masyarakat berperan aktif untuk mengawal penerapan keterbukaan informasi publik secara luas. Tahun 2023 ini, Bidang ASE telah melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik di berbagai kota dan kabupaten se-Jawa Barat dengan daftar pesertanya dihadiri oleh elemen masyarakat sampai pada mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik
Bulan Januari – November Tahun 2023

No	Tanggal	Lokasi Kegiatan	Tema Kegiatan	Narasumber
1	17 Februari 2023	PONPES Riyadlul Huda Kota Tasikmalaya	“Penerapan Keterbukaan Informasi Menurut Pandangan Islam”	<ul style="list-style-type: none"> • KH. Undang Ubaidillah S.Pd. • Dr. H. komarudin chali M.Ag. • Dr. H. Ijang Faisal, M.Si.

				<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Mahi M Hkikmat, M.Si.
2	27 Februari 2023	UIN SGD Kota Bandung	“Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendorong Aksesitas Generasi Z yang Berperan Aktif untuk Sukses Pemilu 2024”	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Idham, SE., M.Si • 2. Totok Hariyono, SH • Handoko Agung Saputro, S.Sos
3	3 Maret 2023	Aula Kantor Kecamatan Cisewu	“Menularkan pentingnya keterbukaan Informasi Publik lewat gerakan Tular Nalar”	<ul style="list-style-type: none"> • Dadan Saputra, S.Pd, M.Si. • Rian Silpia Dewi Tanti Yulianti
4	22 Maret 2023	Aula Utama, Yayasan Al-Kamilah Depok	“Mengambil Hikmah Keterbukaan Informasi dalam Momentum Datangnya Bulan Suci Ramadhan”	<ul style="list-style-type: none"> • Husni Farhani Mubarak • Dr. Asep Kamaluddin Nashir, M.Si • Dr. Nenden Hasanah RA, M.Pd
5	14 April 2023	Ruang Serbaguna Yayasan Penerus Putra Padjajaran Sumedang	“Keterbukaan Informasi Jelang Tahun Politik 2024”	<ul style="list-style-type: none"> • Husni Farhani Mubarak • Urik Yanto, S.Hum • Imam Syafe’l, M.Pd • Syahrial, S.H • Awi Jaya
6	20 Juni 2023	Ruang Rapat Bupati Subang	“Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Profesionalisme dan Kemajuan Pemerintah Kab Subang”	<ul style="list-style-type: none"> • H. Yoyon Karyono, SH., MH • Ine Anggraini, S. Sos., M.Si • Dr. Ika Mardiah, M.Si • Yudaningsih, S.Ag, M.Si, C.Med
7	7 September 2023	Aula Manunggal Kota Bandung	“Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Hak Asasi Manusia Menuju Indonesia yang Maju dan Modern”	<ul style="list-style-type: none"> • Husni Farhani Mubarak • Boyke Hendrasah • Ir. Haryono
8	19 September 2023	Laluasa Coffee and Eatery Kab Cianjur	“Pentingnya Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Pada	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Ijang Faisal, M.Si. • H. Sadar Muslihat, SH.

			Penyelenggaraan Negara Demokrasi”	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Diah Fatma Sjoraida.
9	22 September 2023	Gor Desa Sampiran, Talun Kab Cirebon	“Pentingnya Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Pada Penyelenggaraan Negara Demokrasi”	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Ijang Faisal, M.Si. • H. Muhamad Sidkon, DJ,S.H. • Dr. Mahi M Hikmat., M.Si.
10	25 September 2023	Balai Desa Palasari Kec Ciater Kab Subang	“Keterbukaan Informasi Publik Mewujudkan Pemilu Berintegritas”	<ul style="list-style-type: none"> • Yudaningsih, S.Ag., M.Si • Raden Tedi, ST.
11	26 September 2023	Pondok Pesantren YPI An-Nur Garut	“Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Implementasi Pengamalan Agama”	<ul style="list-style-type: none"> • Dedi Dharmawan, SH., MH. • KH. Deden Moh Ilyas
12	9 Oktober 2023	Aula Tyara Kab.Ciamis	“Generasi Cerdas dan Sehat Informasi Publik Jelang Tahun Politik”	<ul style="list-style-type: none"> • Husni Farhani Mubarak • Dr. Bedi Budiman, S.IP., M.Si. • Alfianto
13	8 November 2023	Institusi Pendidikan Indonesia	“Hak Tahu adalah Hak Asasi Manusia”	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Ijang Faisal, M.Si. • Dr. Endang Dimyati, M.Pd. • H. Ahab Sihabudin, S.H.I.

• Publikasi Media TV, Media Radio, Media Cetak, dan Online

Selain menyosialisasikan keterbukaan informasi melalui kegiatan literasi keterbukaan informasi publik, publikasi melalui media TV, media radio, media cetak, dan media online juga merupakan bagian dari kegiatan Bidang ASE.

Publikasi Media TV dan Radio disampaikan melalui program talkshow. Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi ini dilakukan sebagai cara publikasi langsung dengan harapan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas khususnya masyarakat yang berada di daerah-daerah kabupaten di Jawa Barat. Pada tahun 2023, Komisi Informasi

Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, *Talkshow* di TV, *Talkshow* di Radio dan *Live Streaming Talkshow*, sebagai berikut :

Tabel 9.
Kegiatan Publikasi Media TV dan Radio
Bulan Januari – November Tahun 2023

No	Tanggal	Lokasi Kegiatan	Tema Kegiatan	Narasumber
1	20 Januari 2023	Radio RJM Kab Pangandaran	“Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Islam”	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Ijang Faisal, M.Si. • Dr. H. Badruzaman, S.Ag, M.Pd
2	2 Februari 2023	Radio Darurat Bencana Cianjur (RDB) Kab Cianjur	“Hunian Tetap, kebijakan publik dan hak atas informasi bagi Penyintas Gempa Cianjur”	<ul style="list-style-type: none"> • Dadan Saputra, S.Pd, M.Si. • Atip Rohyana
3	18 Februari 2023	Radio Galunggung Kab. Tasikmalaya	“Keterbukaan Informasi Publik dalam Perpektif Islam”	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Ijang Faisal, M.Si • Drs. H. Uum Syarif Usman
4	25 Februari 2023	Radar TV Kab. Cirebon	“Keterbukaan Informasi Pada Pelaksanaan Ibadah Haji”	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Ijang Faisal, M.Si • Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag. • Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D.
5	2 Maret 2023	Radio Komunitas RASI 107,8 FM	“Keterbukaan informasi publik dan penggunaan akal sehat untuk tata kelola pemerintahan yang baik”	<ul style="list-style-type: none"> • Dadan Saputra, S.Pd, M.Si. • Atip Rohyana
6	15 April 2023	Radio Erks 106,1 FM Sumedang	“Keterbukaan Informasi Publik Jelang Tahun Politik di Kabupaten Sumedang”	<ul style="list-style-type: none"> • Husni Farhani Mubarak • Ridwan Eko Prasetyo • Heri, S.IP, M.Ap
7	3 Mei 2023	Radio MG 104,1 FM Kab Garut	“Keterbukaan Informasi Publik Yang Menjamin Ketepatan Warga Desa Dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Dadan Saputra • Asep Kodir

			Memutuskan Pilihannya Dalam Pilkades Serentak di Kabupaten Garut”	
8	10 Mei 2023	Radio LPPL Tegar Beriman Bogor	“Pentingnya Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. H. Ijang Faisal, M.Si ● Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T. ● Purnama Karnadi
9	12 Mei 2023	Radio RRI PRO 1 FM Kota Bandung	“Pentingnya Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”	<ul style="list-style-type: none"> ● Ijang Faisal ● Dr. R. Widya Setiabudi Sumardinata, M.T., M.Si.
10	12 Mei 2023	Radio Mara FM Kota Bandung	“Pentingnya Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”	<ul style="list-style-type: none"> ● Dimas Prawira
11	25 Mei 2023	Radar TV Kab. Cirebon	“Pentingnya Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”	<ul style="list-style-type: none"> ● Ijang Faisal ● KH. Aziz Hakim Syaerozie
12	10 Juli 2023	Radio Sturada Karawang	“Peran Keterbukaan Informasi Publik menuju Kabupaten Karawang yang lebih maju”	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Hj. Cellica Nurrachadiana ● Abdul Aziz ● Hunsi FM, M.Si (Komisioner KI Jabar)
13	11 Juli 2023	Radio Mara FM Kota Bandung	“Prestasi Keterbukaan Informasi di Jawa Barat”	<ul style="list-style-type: none"> ● Dadan Saputra, S.Pd., M.Si., C.Med ● Dr. H. Setia Gumelar, M.Si. ● Dr. Mahi M Hikmat, M.Si.
14	24 Juli 2023	Radio Mara FM Kota Bandung	“Urgensi Penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik”	<ul style="list-style-type: none"> ● Yudaningsih, S.Ag., M.Si ● Handoko Agung Saputro
15	4 Agustus 2023	Radio Suara Galunggung Giri	“Urgensi Penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. H. Ijang Faisal, M.Si.

		Sakti Kab Tasikmalaya	Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik”	<ul style="list-style-type: none"> • Demi Hamzah Rahadia, SH., M.H.
16	28 Agustus 2023	A Radio Kab Puwakarta	“Keterbukaan Informasi Menuju Tahun Politik di Purwakarta”	<ul style="list-style-type: none"> • Husni Farhani Mubarak • Sabil Akbar
17	5 September 2023	Radio UPI Kota Bandung	“Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Publik di Era Digital”	<ul style="list-style-type: none"> • Yudaningsih, S.Ag., M.Si • Prof. Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si., M.Kom., MCE • Cecep Suryadi, S.Sos., M.E.
18	15 September 2023	Radio Elshifa 100,2 fm Subang	“Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Hak Asasi Manusia Menuju Indonesia yang Maju dan Modern”	<ul style="list-style-type: none"> • Husni Farhani Mubarak • Heri, S.Ip
19	21 September 2023	Radio Maja Kota Bandung	“Membudayakan Keterbukaan Informasi Publik”	<ul style="list-style-type: none"> • Dadan Saputra, S.Pd, M.Si. • B. Adi Rumansyah
20	22 September 2023	Radio LPPM Kab Bekasi	“Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Hak Asasi Manusia Menuju Indonesia yang Maju dan Modern”	<ul style="list-style-type: none"> • Husni Farhani Mubarak • Ihsan Fadilah
21	27 September 2023	Radio Farma Kab Pangandaran	“Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Hak Asasi Manusia Menuju Indonesia yang Maju dan Modern”	<ul style="list-style-type: none"> • Husni Farhani Mubarak • Suparno Saputra
22	11 November 2023	Radio 91,5 RJM FM Pangandaran	“Urgensi Penerapan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik”	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Ijang Faisal, M.Si. • Dr. Bedi Budiman, S.IP., M.Si

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan 22 (dua puluh dua) Kegiatan Talkshow di Radio. Kegiatan tersebut fokus kepada implementasi keterbukaan informasi publik dalam mendukung profesionalisme dan kemajuan Badan Publik.

Penyampaian informasi juga rutin dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui kerjasama dengan media massa, baik cetak maupun online. Namun Tahun ini, Komisi Informasi tidak melakukan publikasi di media cetak. Komisi Informasi telah melakukan 60 *release* dari media online. Berikut adalah 37 Media *Online* yang menampilkan *release* Tahun 2023:

Tabel 10.
Kegiatan Publikasi Media Online
Bulan Januari – November Tahun 2023

No	Media	Jumlah <i>Release</i>
1	kejakimpolnews.com	9 <i>Release</i>
2	TerasJabar.co	5 <i>Release</i>
3	TuguBandung	7 <i>Release</i>
4	detikjabar	2 <i>Release</i>
5	JPNN.Com	2 <i>Release</i>
6	ayo bandung	1 <i>Release</i>
7	Tugu Malang	1 <i>Release</i>
8	eljabar.com	2 <i>Release</i>
9	kabar-priangan.com	1 <i>Release</i>
10	Koran Mandala	2 <i>Release</i>
11	Rumahmedia.com	1 <i>Release</i>
12	Klopak Indonesia	1 <i>Release</i>
13	Portal Jabar	2 <i>Release</i>
14	viva.co.id	1 <i>Release</i>
15	Tribun Priangan	1 <i>Release</i>
16	Jabar ekspres	1 <i>Release</i>
17	Penaku.id	1 <i>Release</i>
18	Jabarnews.com	1 <i>Release</i>
19	Tribun Jabar	1 <i>Release</i>

20	bandungpos.id	2 Release
21	RRI.co.id	1 Release
22	Info Publik	1 Release
23	Tinta hijau	1 Release
24	Melansir.com	1 Release
25	Alexanews.id	1 Release
26	Inilah Koran	1 Release
27	Pojok Satu	1 Release
28	liriknews	1 Release
29	globalmedianews	1 Release
30	beritainspiratif.com	1 Release
31	patrolicyber	1 Release
32	zonabandung.com	1 Release
33	giwangkara.com	1 Release
34	International Media	1 Release
35	Tinta Jabar	1 Release
36	voi.id	1 Release
37	ANTARA	1 Release

- **Monitoring Evaluasi Berbasis Elektronik (E-Monev)
Penerapan Keterbukaan Informasi Publik**

Komisi Informasi berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta Pasal 26 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU KIP bahwa pada pokoknya Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang SLIP pada Badan Publik, selanjutnya Komisi Informasi wajib melakukan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Perki Monev). Selanjutnya mengacu pada Perki 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik diharapkan terlaksana secara serentak seluruh Indonesia, terstandarisasi dan memberi jaminan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta dapat tersedianya data elektronik tentang peta keterbukaan informasi Badan Publik di Indonesia.

Penerapan UU No. 14 tahun 2018 KIP secara masif dan sistematis oleh seluruh Badan Publik, akan berdampak pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat, IKIP Jabar tahun 2021 mendapat *score* 78,56 (diatas *score* rata-rata nasional 72,58) peringkat ke-4 nasional, *score* tahun 2022 adalah 81,93 (di atas rata-rata nasional 74,43) peringkat ke-1 nasional dan untuk *score* tahun 2023 adalah 84,43 (di atas rata-rata nasional 75,50) peringkat ke-1 nasional, Provinsi Jawa Barat masih pada posisi di atas rata-rata nasional IKIP Se-Indonesia sehingga perlu dipertahankan.



Foto. Visitasi Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi berbasis elektronik Se-Jawa Barat tahun 2023 dilaksanakan efektif dimulai Juli 2023 dan berakhir pada November 2023 dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait tahapan indikator penilaian dan kategori Badan Publik, sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022. Selanjutnya Hasil Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dilaporkan kepada Gubernur, DPRD Jawa Barat dan dipublikasikan kepada publik (melalui media cetak dan elektronik) setelah dilaksanakan Penganugerahan secara terbuka. Melalui Monev 2023, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap dapat melakukan sebagai berikut: Pertama, mendorong peningkatan Peran Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten/Kota. Kedua, memperoleh gambaran penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat. Ketiga, memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi Badan Publik dalam menerapkan Keterbukaan Informasi. Keempat, mengoptimalkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

A. Parameter dan Pembobotan Monev 2023

Terdapat parameter pada penilaian monev implementasi keterbukaan informasi publik pada Tahun 2023, parameter penilaian meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- **Kualitas Informasi**, adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
- **Pelayanan Informasi**, adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan biaya ringan.
- **Jenis Informasi**, adalah informasi terbuka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- **Sarana dan Prasarana**, adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
- **Digitalisasi**, adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

- **Komitmen Organisasi**, adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi.
- **Inovasi dan Strategi**, adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non-digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.

Selain parameter penilaian, terdapat pula pembobotan penilaian monev implementasi keterbukaan informasi publik tahun 2023. Parameter pembobotan ini meliputi 80% bobot penilaian terhadap aspek-aspek standar layanan informasi publik dan sisa pembobotannya, yakni bobot 20% terletak pada materi monev pada tahapan persentasi dan/atau visitasi Badan Publik.

B. Objek/Peserta Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 dan hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada Senin tanggal 26 Juni 2023, maka ditetapkan Kategori Badan Publik peserta Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 10

Badan Publik Peserta Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 2023

No	Kategori	Jumlah Badan Publik
1	Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat	27
2	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Jawa Barat	40
3	Badan Usaha Milik Daerah Se-Jawa Barat	9
4	Instansi Vertikal Se-Jawa Barat	22
Jumlah		98

C. Tahapan dan Penilaian

1. Tahap Persiapan Monitoring dan Evaluasi

Persiapan ini meliputi :

- a. Kesiapan Administrasi dan Pembiayaan sesuai Pedoman Umum Monev KI Tahun 2023.
- b. Surat Keputusan Penyelenggaraan Monev 2023, Penetapan Tim Penilai, Tim Verifikator dan Admin *E-Monev* Provinsi.
- c. Penyusunan *SAQ (Self Assesment Questionnaire)*.

2. Tahap Persiapan Monitoring dan Evaluasi

Pemberitahuan mengenai tahapan, metode penilaian, parameter penilaian dan tata cara pengisian kuesioner sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Per-KI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi.

3. Tahap Monitoring

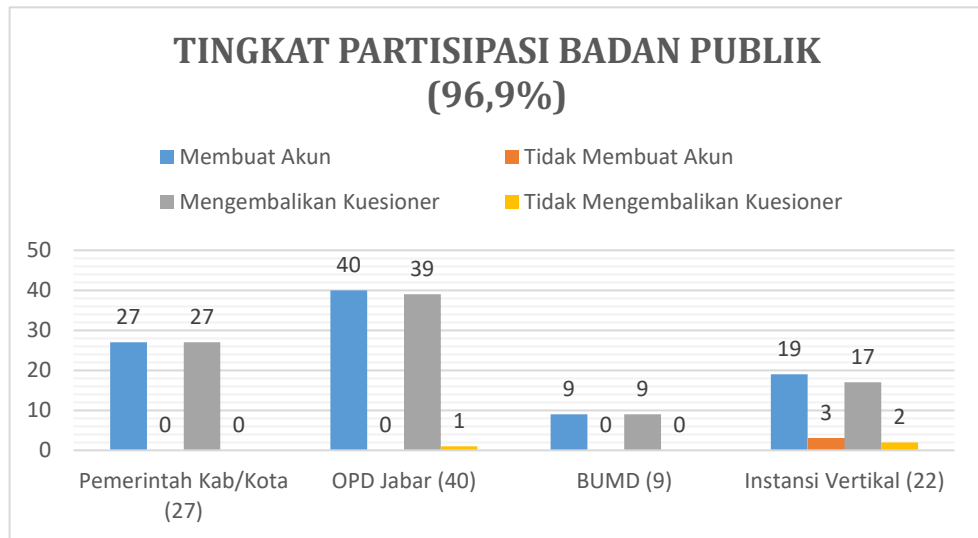
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melaksanakan monitoring kepatuhan Badan Publik terhadap layanan informasi dengan metode dan instrumen monitoring sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi status Badan Publik berdasarkan hasil monev tahun sebelumnya.
- b. Menghimbau kepada 4 Kategori Badan Publik peserta Monev KI 2023, sesuai dengan Aspek Penilaian Monev berdasarkan Perki No. 1 Tahun 2022.

4. Tahap Pembuatan Akun dan Pengisian Kuesioner

Badan Publik melakukan pendaftaran akun dan Mengisi kuesioener pada aplikasi E-Monev (Digital Aplikasi) di laman website Komisi Informasi Pusat pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jabar>.

Diagram 6
Partisipasi Badan Publik di Jawa Barat pada Monev Implementasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Pada Tahun 2023 tingkat Partisipasi Badan Publik dalam mengikuti Monev Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah 96,9% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kategori Pemerintah Kota/Kabupaten : 100%, artinya seluruh Badan Publik membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;
- b. Kategori Organisasi Perangkat Daerah Jawa Barat : 97,5%, artinya 39 OPD Se-Jawa Barat membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner dan 1 OPD tidak membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;
- c. Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-Jawa Barat : 100%, artinya seluruh Badan Publik membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;
- d. Kategori Instansi Vertikal : 86,3%, artinya 19 Instansi Vertikal membuat akun, 3 Instansi Vertikal tidak membuat akun, 17 Instansi Vertikal mengembalikan kuesioner dan 2 Instansi Vertikal tidak mengembalikan kuesioner.

5. Tahap Verifikasi Data

Setelah Komisi Informasi Jawa Barat melakukan penilaian terhadap SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) Badan Publik, dilakukanlah tahapan ini, yakni tahapan verifikasi data. Tahapan ini meliputi verifikasi data untuk memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam SAQ dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Visitasi dan/atau Presentasi merupakan tahap akhir penilaian pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dijalankan oleh Badan Publik;
- b. Metode Penilaian visitasi dan atau presentasi diterapkan pada Badan Publik yang memenuhi ketentuan;
- c. Pembobotan Nilai Visitasi dan/atau Presentasi, berdasarkan penilaian terhadap inovasi dan strategi dengan bobot nilai 20%.

D. Penilaian dan Penetapan

Komisi Informasi menetapkan penilaian hasil monitoring dan evaluasi dengan kualifikasi dan zonasi sebagai berikut :

1. Informatif (90 - 100), Zonasi Hijau;
2. Menuju Informatif (80 - 89,9), Zonasi Biru;
3. Cukup Informatif (60 - 79,9), Zonasi Kuning;
4. Kurang Informatif (40 - 59,9), Zonasi Merah;
5. Tidak Informatif (<39,9), Zonasi Hitam.

Penetapan hasil Monev dilaksanakan melalui Rapat Pleno Tim Monitoring dan Evaluasi di Jawa Barat Tahun 2023. Tim Penilai Independen bersama Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memutuskan bahwa hasil akhir penilaian Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Penilaian Monev KIP Jawa Barat
Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Nama Badan Publik	Nilai SAQ (80%)	Nilai Visitasi (20%)	Nilai Akhir
1	Pemerintah Kabupaten Sumedang	99,6	100	99,68
2	Pemerintah Kota Bandung	97,4	100	97,92
3	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	97,7	98,3	97,82
4	Pemerintah Kabupaten Bandung	99,4	87,5	97,02
5	Pemerintah Kabupaten Karawang	97,2	87,5	95,26
6	Pemerintah Kabupaten Kuningan	95,9	87,5	94,22
7	Pemerintah Kota Bekasi	92,9	99,1	94,14
8	Pemerintah Kota Depok	94,2	89,1	93,18
9	Pemerintah Kabupaten Bogor	94,1	87,5	92,78
10	Pemerintah Kota Banjar	91,75	88,3	91,06
11	Pemerintah Kota Sukabumi	88,7	100	90,96
12	Pemerintah Kabupaten Cirebon	92,4	85	90,92
13	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	91,65	87,5	90,82
14	Pemerintah Kabupaten Subang	90,7	90	90,56
15	Pemerintah Kota Cirebon	88,5	98,5	90,5
16	Pemerintah Kota Cimahi	90,6	90	90,48
17	Pemerintah Kota Tasikmalaya	90,6	88,3	90,14
18	Pemerintah Kabupaten Garut	85,9	92,5	87,22
19	Pemerintah Kota Bogor	83	100	86,4
20	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	86,6	82,5	85,78
21	Pemerintah Kabupaten Bekasi	79,5	90	81,6
22	Pemerintah Kabupaten Majalengka	82,1	71,6	80
23	Pemerintah Kabupaten Ciamis	65,25	90	70,2
24	Pemerintah Kabupaten Indramayu	69,55	71,6	69,96
25	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	64,6	65	64,68
26	Pemerintah Kabupaten Cianjur	55,8	75,8	59,8
27	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	22,2	65	30,76

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil yaitu 17 (tujuh belas) Pemerintah Kota dan Kabupaten masuk ke dalam kategori informatif (90 - 100) zonasi hijau, 5 (lima) Pemerintah Kota dan Kabupaten masuk ke dalam kategori menuju informatif (80 - 89,9) Zonasi Biru, 3 (tiga) Pemerintah Kota dan Kabupaten masuk ke dalam kategori Cukup Informatif (60 - 79,9) Zonasi Kuning, 1 (satu) Pemerintah Kota dan Kabupaten masuk ke dalam kategori Kurang Informatif (40 - 59,9) Zonasi Merah, 1 (satu) Pemerintah Kota dan Kabupaten masuk ke dalam kategori Tidak Informatif (<39,9), Zonasi Hitam.

Tabel 12
 Hasil Penilaian Monev KIP Jawa Barat
 Kategori OPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Nama Badan Publik	Nilai SAQ (80%)	Nilai Visitasi (20%)	Nilai Akhir
1	Dinas Kesehatan	99,8	100	99,84
2	Badan Pendapatan Daerah	99,2	100	99,36
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	97,95	100	98,36
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	97	94,1	96,42
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	94,6	100	95,68
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	96	91,6	95,12
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	93,2	100	94,56
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	91,9	98,3	93,18
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	91,7	97,5	92,86
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91,1	97,5	92,38
11	Dinas Perhubungan	96,8	71,6	91,76
12	Inspektorat Daerah	90,4	96,6	91,64
13	Dinas Pendidikan	89,6	98,3	91,34
14	Dinas Kehutanan	89,1	100	91,28
15	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	88,8	100	91,04

16	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	95,2	74,1	90,98
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91	90	90,8
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	88,4	100	90,72
19	Badan Penghubung	88,2	100	90,56
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91,35	86,6	90,4
21	Dinas Sosial	87,9	100	90,32
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94,65	72	90,12
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jawa Barat	89,6	92	90,08
24	Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan	85,1	98,3	87,74
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	80	90,8	82,16
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79,3	88,3	81,1
27	Dinas Perkebunan	80,9	67,5	78,22
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	72,7	98,3	77,82
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77,4	65	74,92
30	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	69,25	97,5	74,9
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,15	79,1	73,54
32	Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat	66,8	78,3	69,1
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67,2	70	67,76
34	Badan Kepegawaian Daerah	57	92,5	64,1
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	51,15	94,1	59,74
36	Dinas Lingkungan Hidup	52,65	51,6	52,44

37	Satuan Polisi Pamong Praja	33,9	85	44,12
38	Dinas Perumahan dan Permukiman	23,95	90,8	37,32
39	Dinas Sumber Daya Air	28,3	64,1	35,46
40	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	0	96,6	19,32

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil yaitu 23 OPD ke dalam kategori informatif (90-100) zonasi hijau, 3 (tiga) OPD masuk ke dalam kategori menuju informatif (80-89,9) Zonasi Biru, 8 (delapan) OPD masuk ke dalam kategori Cukup Informatif (60-79,9) Zonasi Kuning, 3 (tiga) OPD masuk ke dalam kategori Kurang Informatif (40-59,9) Zonasi Merah, 3 (tiga) OPD masuk ke dalam kategori Tidak Informatif (<39,9), Zonasi Hitam.

Tabel 13
Hasil Penilaian Monev KIP Jawa Barat
Kategori BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Nama Badan Publik	Nilai SAQ (80%)	Nilai Visitasi (20%)	Nilai Akhir
1	PT. Tirta Gemah Ripah	92.7	88.6	91.88
2	PT. Bank Jabar Banten	89.55	97.5	91.14
3	PD. Jasa dan Kepariwisata	88.4	100	90.72
4	PT. Migas Utama Jabar (Perseroda)	40	82	48.4
5	PT. Agro Jabar	32.05	89.5	43.54
6	PT. Agronesia	23.05	76.1	33.66
7	PT. Jasa Sarana Jawa Barat	22.5	72	32.4
8	PT. Jamkrida Jabar	9.95	82.5	24.46
9	PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB)	5.8	97.5	24.14

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil yaitu 3 (tiga) BUMD masuk ke dalam kategori informatif (90 - 100) zonasi hijau, 2 (dua) BUMD masuk ke dalam BUMD masuk ke dalam kategori Kurang Informatif (40-59,9) Zonasi Merah, 4 (empat) BUMD masuk ke dalam kategori Tidak Informatif (<39,9), Zonasi Hitam.

Tabel 14
 Hasil Penilaian Moneyv KIP Jawa Barat
 Kategori Instansi Vertikal Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Nama Badan Publik	Nilai SAQ (80%)	Nilai Visitasi (20%)	Nilai Akhir
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat	99	100	99.2
2	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	98.6	100	98.88
3	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat	90.6	100	92.48
4	Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung	88.9	100	91.12
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat	88.3	99.1	90.46
6	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat	88.2	98	90.16
7	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat	88.15	98	90.12
8	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat	87.5	100	90
9	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat	58.1	70	60.48
10	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat	55.35	70	58.28
11	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat	29.05	70	37.24
12	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat	24.15	70	33.32
13	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	16.2	70	26.96
14	Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat	7	70	19.6
15	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat	3.8	70	17.04
16	Kwarda dan Pramuka Jawa Barat	0	0	0
17	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil yaitu 8 (delapan) Instansi Vertikal ke dalam kategori informatif (90 - 100) zonasi hijau, 1 (satu) Instansi Vertikal masuk ke dalam kategori Cukup Informatif (60 - 79,9) Zonasi Kuning, 1 (Satu) Instansi Vertikal masuk ke dalam kategori Kurang Informatif (40 - 59,9) Zonasi Merah, 7 (tujuh) Instansi Vertikal masuk ke dalam kategori Tidak Informatif (<39,9), Zonasi Hitam.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bersama Tim Penilai Independen pun melakukan monitoring pada 10 (sepuluh) Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kesepuluh Partai Politik tersebut telah menerapkan Standar Layanan Informasi Publik baik secara online maupun offline, mengumumkan segala bentuk program-kegiatan di media sosial maupun website dan memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara mudah

E. Pengumuman dan Penganugerahan

Komisi Informasi Jawa Barat menyampaikan dan mengumumkan hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengumuman hasil Monev 2023 dan Penganugerahan Badan Publik Informatif tertinggi, diperkirakan pada bulan November tahun 2023;
2. Hasil Monev dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat 2023 yang memuat kategori, nilai dan kualifikasi hasil penetapan Tim Penilai;
3. Pelaksanaan kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik akan diinformasikan selanjutnya;
4. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023 Provinsi Jawa Barat akan disertakan dalam kegiatan Anugerah Tinarbuka Komisi Informasi Pusat Tahun 2024.

Pada Tahun 2023 tepatnya Bulan Mei, Komisi Informasi Jawa Barat mengirimkan usulan Badan Publik ke tingkat Nasional berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 pada kegiatan Anugerah Tinarbuka yang bertepatan dengan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat. Badan Publik yang diutus oleh Komisi Informasi Jawa Barat adalah Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Bawaslu Jawa Barat, KPU Jawa Barat, Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. Dari 7 utusan tersebut ada 2 Badan Publik yang mendapatkan penghargaan yaitu Pemerintah Kabupaten Sumedang Juara ke-1 dan Badan Pendapatan Daerah Juara ke-3 tingkat Nasional.

- **Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Jawa Barat**

Kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan program Komisi Informasi Pusat. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar semua Badan Publik menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat sebagai pengguna informasi publik.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik disusun untuk mendapatkan Indeks tingkat Provinsi dan Nasional di Indonesia. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi di Indonesia serta mendorong Badan Publik untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi pada tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Adapun alur proses kegiatan pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 adalah:

Tabel 15
Alur Proses Kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023

No.	Tanggal	Kegiatan	Lokasi
1.	1 s.d 3 Maret 2023	Bimbingan Teknis IKIP 2023 Regional 3	Cavinton Hotel Yogyakarta
2.	9 Mei 2023	Pengambilan Data dan Pengisian Kuesioner via Website	Mercure Hotel Lengkong
3.	14 Mei 2023	FGD Daerah Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Hotel Aston Pasteur
4.	29 Mei 2023	Penyerahan Buku Laporan IKIP 2023 Jawa Barat	KI Pusat
5.	13 s.d 15 Juni 2023	<i>National Assessment Council Forum (NAC Forum) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2023</i>	Pullman Hotel Jakarta Central Park
6.	14 September 2023	Launching Buku IKIP 2023	Lumire Hotel Jakarta

A. Kelompok Kerja Daerah Jawa Barat (POKJADA)

Pada kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 diperlukan kelompok kerja/ POKJA sebagai pengarah untuk Informan Ahli Daerah di Jawa Barat.

Tabel 16
Kelompok Kerja Daerah Jawa Barat pada IKIP 2023

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Dr. H. Ijang Faisal, M.Si, C.Me	Ketua Pokjada	Internal
2.	Dadan Saputra, M.Si, C.Me	Anggota	Internal
3.	Faiz Rahman, S,TP	Anggota	Pemerintah
4.	Dr. Mahi M. Hkikmat	Anggota	Akademisi/Masyarakat
5.	Dr. Sufyan ABD	Anggota	Akademisi/Masyarakat

B. Informan Ahli Daerah Jawa Barat

Pada kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 diperlukan Informan Ahli Daerah sebagai objek dari pengisi kuesioner, yang mewakili dari berbagai unsur.

Tabel 17
Informan Ahli IKIP 2023

No .	Nama	Unsur
1.	Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si.	- Akademisi
2.	Dr. Diah Fatma Sjoraida, M.Si.	- Praktisi
3.	Dr. Iu Rusliana	- Masyarakat Sipil
4.	Erwin Kustiman, M.Si.	- Pelaku Usaha
5.	Dr. H. M. Amar Khana	- Pengurus Asosiasi Usaha
6.	Dr. H. Zaenal Aripin, S.E, M.Si.	
7.	Diah Setiyawati, S.Sos., M.A.	
8.	Andhika Pratama, S.IP, M.IP.	- Pemerintah
9.	Karpati Wanda Hidayat, S.Sos., M.AP.	- Badan Publik

C. Capaian Kegiatan

Kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 terbagi atas 3 lingkungan, yakni Lingkungan Fisik dan Politik, Lingkungan Ekonomi, serta Lingkungan Hukum.

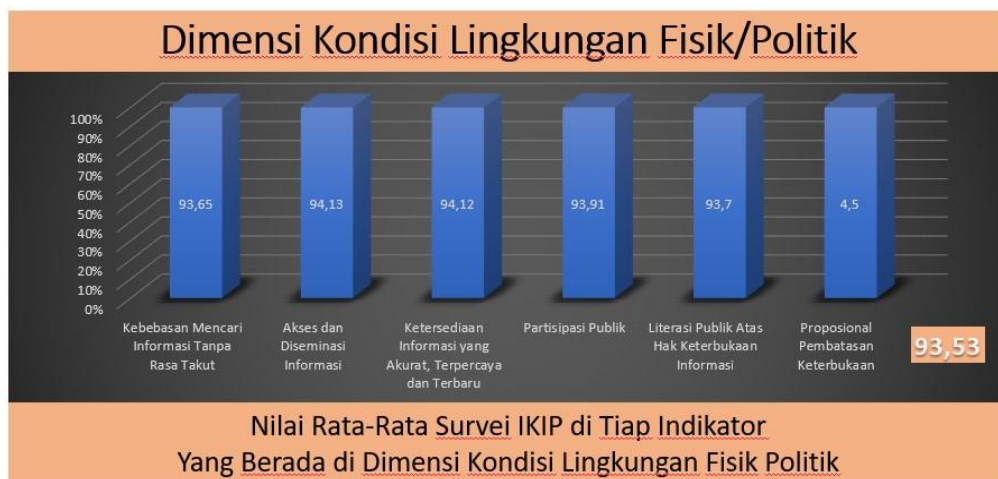
Lingkungan Fisik dan Politik

Keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Barat salah satunya ditentukan kondisi politik. Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, serta era transparansi lintas sektor, konteks kondisi politik di sini adalah peraturan yang dibuat pemerintah daerah dalam mengakomodasi hak masyarakat untuk tahu (*right to know*). Kondisi politik tersebut sangat krusial dalam memotret sejauh mana lingkungan hidup bersama tersedia sedemikian rupa dalam menjamin keterbukaan informasi,

termasuk melihat sejauh mana relasi-relasi politik yang ada menghambat atau memajukan kebebasan atas informasi.

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Jawa Barat untuk dimensi lingkungan fisik dan politik secara akumulasi memperoleh nilai 93,53 pasca dilakukan triangulasi dan kalibrasi. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan fisik dan politik di Jawa Barat ada dalam rentang kategori Sangat Baik. Bahkan jika dibandingkan dengan hasil IKIP 2022, terjadi kenaikan 3,64 poin lebih. Berikut perbandingannya:

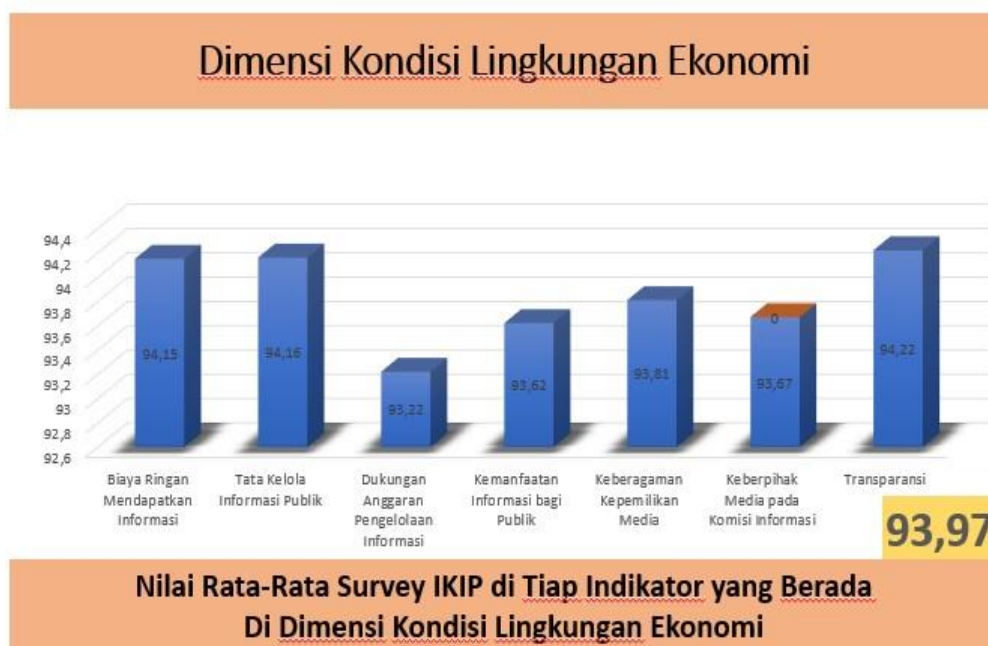
Diagram 7
Dimensi Kondisi Lingkungan Fisik/Politik



Lingkungan Ekonomi

Kondisi ekonomi sangat krusial untuk memotret bagaimana akses atas informasi terbuka secara ekonomis, dan keterbukaan sebagaimana institusi-institusi yang menengahi perkara informasi secara finansial tetap dapat menjaga independensinya. Kondisi ekonomi dengan akses keterbukaan informasi sangat mempengaruhi dan menentukan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara umum dimensi kondisi lingkungan ekonomi di Provinsi Jawa Barat mendapatkan skor 93,97 atau sangat baik sekaligus naik dari raihan IKIP tahun sebelumnya; tahun 2022 skor 89,01 dan 2021 sebesar 82,51 yang juga kategori baik. Berikut perbandingannya:

Diagram 8
Dimensi Kondisi Lingkungan Ekonomi

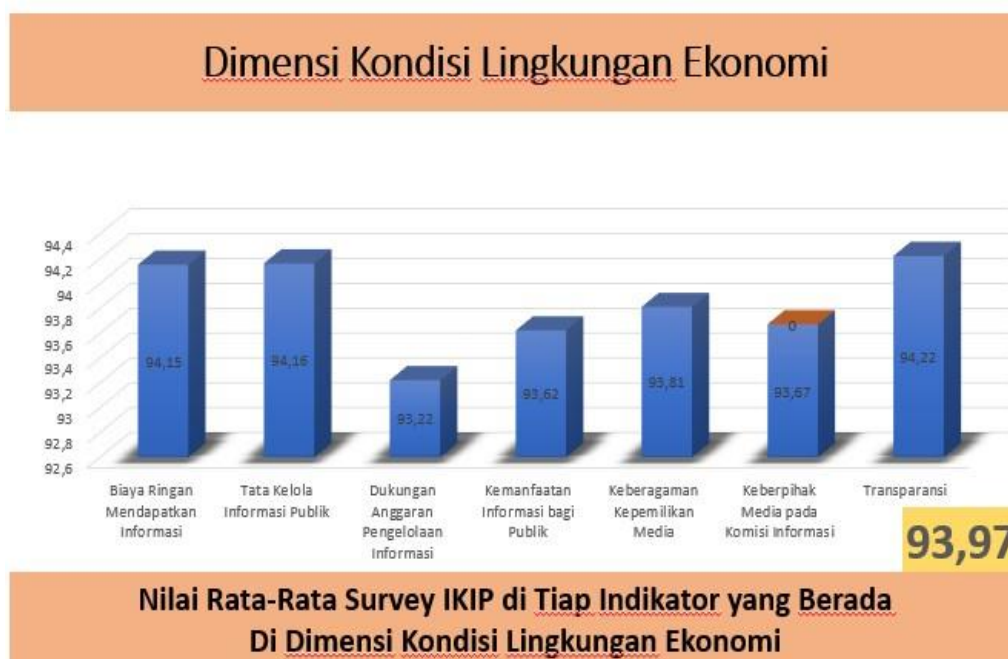


Lingkungan Hukum

Kondisi hukum menjadi hal yang sangat krusial untuk memberi jaminan perlindungan konstitusional atas kebebasan informasi. Kondisi hukum mencakup baik dari sisi substansi maupun formal. Adapun informasi yang digali dari dimensi hukum adalah ada tidaknya peraturan-peraturan daerah dan turunannya yang bertujuan untuk melindungi keterbukaan informasi. Selain melihat ketersediaan peraturan adalah bagaimana peraturan itu dijalankan atau diimplementasikan.

Dalam dimensi hukum mencakup 28 pertanyaan yang terbagi dalam 7 (tujuh) indikator. Dibandingkan dua dimensi sebelumnya, dimensi hukum ini secara umum mendapatkan nilai rata-rata 93,19 berdasarkan penilaian informan ahli dalam memotret wilayah hukum yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bahkan dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2021, terjadi kenaikan. Berikut perbandingannya:

Diagram 9
Dimensi Kondisi Lingkungan Ekonomi



Tahapan penyusunan IKIP 2023 di Provinsi Jawa Barat dimulai dengan rapat Pokja untuk memilih Informan Ahli (IA), wawancara terkait Kuesioner IKIP 2023 secara digital dan penjelasannya kepada Informan Ahli, serta tahapan akhirnya Focus Group Discussion (FGD) antara Komisi Informasi Pusat, Pokja IKIP Provinsi Jawa Barat dan Informan Ahli; serta penyusunan IKIP 2023 oleh Pokja.

Dari keseluruhan tahapan tersebut di Provinsi Jawa Barat maka disusunlah laporan akhir penyusunan IKIP Provinsi Jawa Barat yang memotret pelaksanaan keterbukaan Informasi berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di wilayah Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2021-2022.

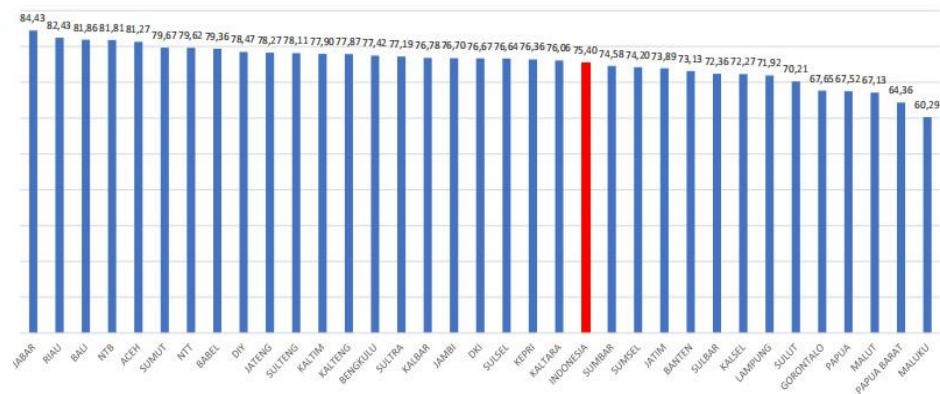
Penyusunan IKIP di wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan program nasional yang ketigakalinya dilaksanakan, maka tentu saja banyak hal yang jauh dari sempurna, tetapi tentu saja ini sebagai cara untuk memperbaiki proses penyusunan IKIP selanjutnya di masa yang akan datang.

Hasil penyusunan IKIP ini adalah untuk melihat pelaksanaan UU KIP oleh Badan Publik di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan keterbukaan

informasi publik dari tiga sisi: lingkungan Fisik/Politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Harapannya agar badan publik bisa semakin baik dalam melaksanakan keterbukaan informasi di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat menjadi Juara, meraih nilai tertinggi IKIP tahun 2023 sekaligus menduduki ranking pertama dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, dengan nilai kumulatif 84,43 sekaligus melampaui IKIP tingkat nasional yang bernilai akumulatif 75,40 atau berkategori **Sedang**. Jawa Barat pun berhasil mempertahankan sebagai Provinsi Ranking Pertama IKIP nilai tertinggi selama dua tahun berturut-turut (2022 & 2023), Nilai IKIP Jabar 2023 pun melonjak dari nilai IKIP Jabar 2022 sebesar 2,50 point. Pada tahun 2022 nilai IKIP Jabar 81,93, sedangkan pada IKIP 2023 84,43.

INDEKS IKIP 34 PROVINSI DAN NASIONAL



Sumber Informasi: KOMISI INFORMASI PUSAT

Provinsi lainnya yang berkategori **Baik** dengan meraih nilai IKIP 2023 di bawah Jawa Barat berturut-turut adalah Provinsi Riau (82,43), Bali (81,86), NTB (81,81), dan Aceh (81,27). Sementara itu, IKIP Nasional 2023 tetap dalam kategori **SEDANG** dengan nilai meningkat dari 74,43 Tahun 2022 menjadi 75,40 tahun 2023 atau naik sebesar 0,97 point.

Hal itu diumumkan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) RI melalui Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi (Litdok) KI Pusat RI, Rospita Vici Paulyn di Jakarta, 15 Juni 2023. Menurut Vici, metode pengumpulan nilai IKIP 2023 sama dengan tahun 2021 dan 2022, yaitu melalui pengumpulan nilai yang melibatkan tim Kelompok

Kerja (Pokja) IKIP Pusat dan Pokja Daerah di 34 Provinsi. Tim Pokja IKIP Pusat terdiri dari Komisioner KI Pusat dan Tim Ahli Pusat, sedangkan Tim Pokja IKIP Daerah terdiri dari Komisioner KI Provinsi dan Tim Pokja unsur eksternal daerah dengan jumlah seluruhnya 238 orang.

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK INDONESIA 2023

NO	INDEKS	NILAI SKOR	BOBOT	SKOR INDEKS	SKOR IKIP
1	SKOR INDEKS NASIONAL	77.95	70%	54.57	75,40
2	SKOR NAC	69.45	30%	20.84	

~~Sumber Informasi: KOMISI INFORMASI PUSAT~~

Pelaksanaan pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan melalui kuesioner yang disampaikan Tim Pokja Daerah di setiap provinsi ke IA (Informan Ahli) provinsi yang terdiri dari 9 orang, meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur akademisi, dan unsur CSO atau LSM di setiap provinsi. Hasil penilaian kuesioner oleh 9 IA dibahas dalam kegiatan FGD melibatkan Tim IKIP Pusat untuk mendapatkan skor akhir IKIP Provinsi. Hasil dari nilai final IKIP di setiap Provinsi dibawa ke pembahasan NAC Forum yang melibatkan 10 IA Nasional eksternal dan 7 IA internal KI Pusat hingga dihasilkan nilai final IKIP Nasional 2023.

Metode penyusunan nilai IKIP dibagi dalam lima kategori, yaitu kategori nilai buruk sekali antara 0-39, kategori nilai buruk 40-59, kategori nilai sedang 60-79, kategori nilai baik 80-89, dan kategori baik sekali 90-100.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Dr. H. Donny Yoesgiantoro menegaskan, Forum National Assessment Council (NAC) Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan program prioritas dan dilaksanakan setiap tahun. Meskipun menghadapi beberapa kendala, tetapi karena seluruh Komisioner KIP Pusat dan Daerah bersatu padu bahu membahu bekerja keras, sehingga program ini dapat terselesaikan untuk tahun ketiga ini.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pun berandil besar dalam penyusunan IKIP 2023 tersebut dengan ikut serta menjalankan semua tahapan sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Komisi Informasi Pusat, termasuk dalam memilih Informan Ahli yang memiliki kompetensi memadai dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

IKIP 2023 pun bagi Komisi Informasi Jawa Barat merupakan event yang strategis guna melakukan evaluasi diri bagi implementasi keterbukaan informasi di Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga melingkupi Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi UU KIP Komisi Informasi Pusat akhir tahun 2022 yang juga menempatkan Provinsi Jawa Barat meraih sebagai Provinsi Informatif.

• Kegiatan Apresiasi Desa

Kegiatan Apresiasi Desa tahun 2023 merupakan kegiatan yang ketiga kalinya diikuti oleh Komisi Informasi Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan program yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Apresiasi desa berdasarkan;

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Adapun, tujuan dari dilaksanakannya kegiatan apresiasi desa ini antara lain;

1. Mendorong terpenuhinya hak azasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses.
2. Mendorong tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, yaitu informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

3. Mendorong agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa.
4. Mendorong pengelolaan Desa untuk mewujudkan good governance.
5. Menghindarkan Desa dari budaya tertutup.
6. Menjadi referensi dalam proses pengambilan kebijakan publik bagi perangkat desa.

Di samping itu, Apresiasi Desa dilaksanakan dengan maksud memperoleh gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa melalui dua indikator penilaian sebagaimana dalam tabel di bawah ini;

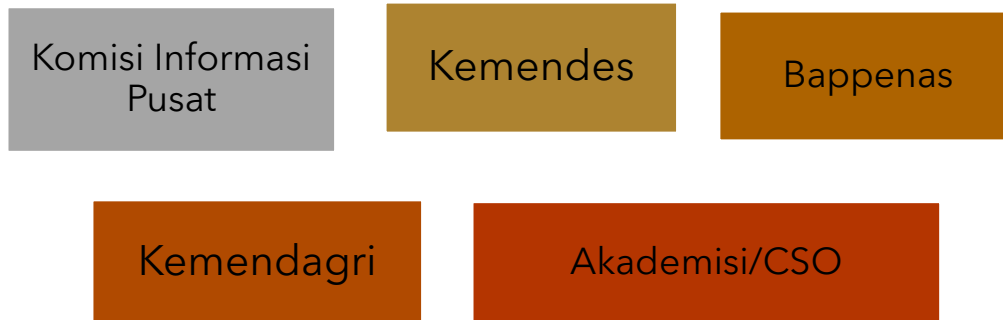
Tabel 18
Indikator dan Bobot Penilaian *Self Assesment Questionnaire*

No.	Indikator	Persentase 60%
1.	Komitmen	
2.	SDM	
3.	Dokumen	
4.	Partisipasi & Akses	

Tabel 19
Indikator dan Bobot Penilaian Verifikasi

Indikator	Variabel	Persentase 40%
Inovasi	Kualitas Ketersediaan Informasi	
	Layanan Informasi Publik	

Tim Penilai Apresiasi Desa meliputi:



Tahun 2023 Komisi Informasi Jawa Barat intens bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengusulkan 3 (tiga) nama desa ke Komisi Informasi Pusat yang kemudian tertuang di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Usulan Tiga Desa Perwakilan Jawa Barat Untuk Kegiatan Apresiasi Desa Tahun 2023 yaitu **Desa Cinta** Kabupaten Garut, **Desa Taringgul Tonggoh** Kabupaten Purwakarta dan **Desa Kutamanggu** Kabupaten Majalengka sebagai perwakilan desa dari Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Apresiasi Desa tahun 2023.

Setelah mendapatkan rekomendasi desa dari hasil kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komisi Informasi Jawa Barat melakukan assessment atau penilaian langsung ke tiga desa sekaligus melakukan pendampingan untuk persiapan pengisian SAQ oleh masing-masing desa terpilih (<https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>) menggunakan kuisisioner sebagai instrument penilaian dengan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan berdasarkan Per-KI No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Setelah melalui berbagai tahapan, dari usulan tiga desa tersebut belum ada yang bisa mewakili Jawa Barat sebagai desa terbaik dalam keterbukaan informasi publik di tingkat nasional. Kami terus berusaha dan berharap semoga pada tahun selanjutnya desa di Jawa Barat bisa berada di 10 besar tingkat nasional sebagai desa informatif. Adapun *timeline* tahapan kegiatan Apresiasi Desa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tahun 2023;

Tabel 20.
Indikator dan Bobot Penilaian Verifikasi Apresiasi Desa 2023

No	Tahapan	Penanggungjawab	Timeline
1	Pengumpulan SK Penunjukan 3 Desa ke KI Pusat	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	31 Agustus 2023
2	Rapat Hasil Assessment Apresiasi Desa	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	1 September 2023
3	Surat Pemberitahuan ke 3 Desa Tembusan: - DPMD Provinsi - DPMD Kabupaten - Kecamatan Masing-masing Lampiran: SK	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	4 September 2023
4	Zoom Sosialisasi Kegiatan Apresiasi Desa : - Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat - DPMD Provinsi Jawa Barat 3 Desa	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	6 September 2023
5	Zoom Sosialisasi Kegiatan Apresiasi Desa	Komisi Informasi Pusat	8 September 2023
6	Pengisian Kuisisioner	3 Desa	11 – 22 September 2023
7	Verifikasi Pengisian Kuisisioner	Komisi Informasi Pusat	25 September – 6 Oktober 2023
8	Visitasi Desa	Komisi Informasi Pusat	16 – 31 Oktober 2023
9	Penghargaan Apresiasi Desa	Komisi Informasi Pusat	9 November 2023

- **Pencapaian Target Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi**

Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) melaksanakan 4 (empat) program kerja utama yaitu : Literasi Keterbukaan Informasi Publik, Publikasi Media TV, Media Radio, Media Cetak dan Online, Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik, Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Apresiasi Desa.

Sampai pada bulan November Tahun 2023 Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) telah melaksanakan kegiatan Literasi sebanyak 13 (tiga belas) kali di berbagai tempat di wilayah provinsi Jawa Barat dengan mengundang Narasumber dari berbagai unsur seperti Akademisi, Praktisi keterbukaan informasi, dll. Adapun Kegiatan Publikasi di Media TV maupun Radio sudah dilakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali.



Foto. Visitasi Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu total Badan Publik yang masuk kategori Informatif sebanyak 51 Badan Publik dengan persentase 52%, Badan Publik yang masuk kategori Menuju Informatif sebanyak 8 Badan Publik dengan persentase 8,1%, Badan Publik yang masuk kategori Cukup Informatif sebanyak 12 (dua belas) Badan Publik dengan persentase 12,2%, Badan

Publik yang masuk kategori Kurang Informatif sebanyak 7 (tujuh) Badan Publik dengan persentasi 7,1% dan Badan Publik yang masuk kategori tidak Informatif sebanyak 15 (lima belas) Badan Publik dengan persentase 15,3%.

Provinsi Jawa Barat melalui Komisi Informasi Jawa Barat melakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2023 di Jawa Barat dengan mewawancarai sembilan ahli terpilih dengan latar belakang meliputi keterwakilan badan publik, akademisi, organisasi masyarakat yang fokus terhadap isu keterbukaan informasi publik, pengusaha, serta jurnalis. Informan ahli menjawab tiga dimensi pertanyaan yakni lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Penilaian Komisi Informasi (KI) Pusat bersama Tim Ahli dalam Forum National Assesment Council (NAC) yang diselenggarakan tanggal 13 - 15 Juni 2023 di Hotel *Pullman* Jakarta mendapatkan skor terakhir IKIP Jawa Barat 2023 dengan nilai 84,43 atau dalam kategori **Baik** meningkat dari tahun 2022 yang bernilai 81,93. Skor tersebut masih menempatkan IKIP Jawa Barat pada urutan pertama dari 34 provinsi di Indonesia.

Kegiatan Apresiasi Desa merupakan Program yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat, Pada Tahun 2022 Komisi Informasi Jawa Barat mengusulkan 3 (tiga) nama desa ke Komisi Informasi Pusat yang tertuang didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Usulan Dua Desa Perwakilan Jawa Barat Untuk Kegiatan Apresiasi Desa Tahun 2023 yaitu **Desa Cinta Kabupaten Garut, Desa Taringgul Tonggoh** dan **Desa Kutamunggu Kabupaten Majalengka** sebagai perwakilan desa dari Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Apresiasi Desa tahun 2023.

Bidang

Kelembagaan

Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memiliki tugas menyusun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan serta melakukan koordinasi penguatan kelembagaan, kegiatan kerjasama dengan Komisi Informasi kabupaten/kota, dan Badan Publik se-Jawa Barat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi Komisioner maupun Asisten di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan sistem dukungan terhadap pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, serta kerjasama dengan media massa, baik cetak maupun online untuk penyampaian informasi secara rutin.



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke DPRD Provinsi Jawa Barat

- **Penguatan Kelembagaan**

Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam keterbukaan informasi di Indonesia yang signifikan sebagai lembaga yang mengawal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan menjamin hak akses informasi masyarakat Provinsi Jawa Barat harus dilakukan penguatan dengan Badan Publik di Provinsi Jawa Barat. Manfaat yang didapatkan dari Penguatan Kelembagaan ini adalah terbentuk dan tersusunnya tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang mencerminkan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan penyusunan rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi unit kerja.

Penguatan kelembagaan di tahun 2023 ini, diawali dengan Kunjungan ke Badan Publik yang mendapatkan predikat informatif pada Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, untuk menyerahkan Piala Monev dan pembahasan terkait tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 21
Kunjungan Bidang kelembagaan ke Badan Publik

No	Tanggal	Kunjungan Kelembagaan	Maksud dan Tujuan
1	26 Januari 2023	BPKAD Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
2	26 Januari 2023	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
3	30 Januari 2023	Pemerintah Kota Bekasi	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
4	31 Januari 2023	Pemerintah Kota Bandung	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
5	31 Januari 2023	Pemerintah Kota Cirebon	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
6	3 Februari 2023	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
7	8 Februari 2023	Pemerintah Kota Depok	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
8	9 Februari 2023	Pemerintah Kota Bogor	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022

9	17 Februari 2023	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
10	20 Februari 2023	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Kunjungan Kelembagaan (Kaji Banding Kinerja)
11	22 Februari 2023	Desa Ponggok Provinsi Jawa Tengah	Kunjungan Kelembagaan dan Koordinasi Keterbukaan Informasi
12	23 Februari 2023	Pemerintah Kabupaten Kuningan	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
13	24 Februari 2023	Diskominfo Provinsi Jawa Timur	Kunjungan Kelembagaan (Kaji Banding Kinerja)
14	24 Februari 2023	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
15	27 Februari 2023	Biro Hukum Provinsi Jawa Barat	Rapat Koordinasi
16	3 Maret 2023	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
17	16 Maret 2023	Komisi Informasi Pusat	Koordinasi terkait IKIP
18	21 Maret 2023	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
19	4 April 2023	Bupati Kabupaten Sumedang	Kunjungan Kelembagaan (Mendampingi Komisioner KI Pusat dalam Visitasi Perangkat Daerah di Jawa Barat)
20	5 April 2023	BPKAD Provinsi Jawa Barat	Audiensi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
21	11 April 2023	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
22	18 April 2023	Komisi Informasi Pusat	Kunjungan Kelembagaan dan Koordinasi
23	16 Mei 2023	Diskominfo Kab Karawang	Kunjungan Kelembagaan dan Koordinasi
24	19 Mei 2023	DP3AKB Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
25	25 Mei 2023	Diskominfo Kota Bogor	Kunjungan Kelembagaan dan Kaji Banding
26	26 Mei 2023	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022

27	30 Mei 2023	Komisi Informasi Pusat	Kunjungan Kelembagaan (Penyerahan Laporan IKIP dan Koordinasi terkait Monev Serentak)
28	12 Juni 2023	Diskominfo Kabupaten Sumedang	Kunjungan Kelembagaan dan Kaji Banding
29	12 Juni 2023	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa informasi publik khususnya dalam penanganan Keberatan di PTUN dan Mahkamah Agung RI
30	3 Juli 2023	Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	Kunjungan Kelembagaan (Kaji Banding Kinerja)
31	10 Juli 2023	Pemerintah Kabupaten Karawang	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Piala Monev 2022
32	28 Juli 2023	Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat	Audiensi terkait program kerja Komisi Informasi dan masa kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
33	31 Juli 2023	Jimly School Of Law And Government	Kunjungan Kelembagaan dan Koordinasi tentang Pelatihan
34	1 Agustus 2023	Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan dan Koordinasi tentang Pelatihan
35	18 Agustus 2023	Desa Citambur Kabupaten Cianjur	Kunjungan Kelembagaan dan Kaji Banding
36	21 September 2023	BPMD Provinsi Jawa Barat	Audiensi (Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat)
37	21 September 2023	Komisi Informasi Kota Cirebon	Kunjungan Kelembagaan (Kaji Banding Kinerja)
38	25 September 2023	Biro Hukum Provinsi Jawa Barat	Koordinasi Kelembagaan
39	6 November 2023	Setwan DPRD Provinsi Jawa Barat	Koordinasi Kegiatan Puncak Penganugerahan Hasil Monev 2023

Tahun 2023, Komisi Informasi juga menerima kunjungan dari Badan Publik di dalam dan luar Provinsi Jawa Barat seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 22
Kunjungan ke Komisi Informasi

No	Tanggal	Kunjungan Kelembagaan	Maksud dan Tujuan
1	6 Januari 2023	Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat	Audiensi (Perkuat Koordinasi Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas)
2	28 Februari 2023	DPMD Provinsi Jawa Barat	Audiensi (Implementasi Keterbukan Informasi Publik di Jawa Barat)
3	20 Maret 2023	PTUN Bandung	Audiensi (Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Informasi)
4	3 April 2023	Komisi Informasi Pusat	Kunjungan Kelembagaan dan Visitasi Perangkat Daerah di Jawa Barat
5	8 Mei 2023	DPRD Provinsi Banten	Study Komparasi Terkait Program Kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
6	15 Mei 2023	Komisi Informasi Provinsi Maluku	Kaji Banding Terkait Program Kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
7	16 Mei 2023	Diskominfo Kabupaten Purwakarta	Audiensi (Implementasi Keterbukan Informasi Publik di Jawa Barat)
8	29 Mei 2023	Komisi Informasi Provinsi Riau	FGD (Optimalisasi Sumber Daya Menuju KI Lebih Profesional)
9	9 Juni 2023	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Koordinasi Kelembagaan
10	21 Juni 2023	Komisi Informasi Pusat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Koordinasi Kelembagaan
11	5 Oktober 2023	Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia	Kunjungan Koordinasi Kelembagaan

Selain kegiatan kunjungan ke Badan Publik dan Kunjungan dari Badan Publik ke Komisi Informasi di atas terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik lain, namun turut mengundang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 23
Kegiatan Kelembagaan

No	Tanggal	Kegiatan	Peserta
1	6 Maret 2023	Menghadiri Undangan Forum Diskominfo Provinsi Jawa Barat TA 2023	Diskominfo se-Indonesia
2	26-28 Maret 2023	Menghadiri Undangan Tinarbuka Komisi Informasi Pusat	Komisi Informasi Se-Indonesia
3	27-28 Maret 2023	Mendampingi Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Menghadiri Undangan Tinarbuka Komisi Informasi Pusat	Bupati/Walikota, Kepala Dinas/Badan/Direktur, Penyelenggara Pemilu Pilihan
4	2 Mei 2023	Menghadiri Undangan Upacara Hari Pendidikan Nasional	Badan Publik Se-Jawa Barat
5	10 Mei 2023	Menghadiri Undangan Silaturahmi Tingkat Provinsi Jawa Barat	Badan Publik Se-Jawa Barat
6	16 Mei 2023	Menghadiri Undangan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) di Kabupaten Kampar, Riau	Komisi Informasi Se-Indonesia
7	25 Mei 2023	Menghadiri Undangan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Informasi Publik di Kota Bengkulu	Perwakilan Kementerian dan Lembaga, Sekda dan KID Se-Indonesia
8	14-15 Juni 2023	Menghadiri Undangan National Assessment Council Forum (NAC Forum) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2023	Komisi Informasi Se-Indonesia

9	27 Juni 2023	Menghadiri Undangan Pelantikan Ketua PTUN Bandung di PTUN Jakarta	Tamu Undangan Ketua PTUN Bandung
10	25 Juli 2023	Menghadiri Undangan Universitas Pendidikan Indonesia “Deklarasi Zona Integrasi”	Tamu Undangan Universitas Pendidikan Indonesia
10	7-10 Agustus 2023	Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Nasional ke-13 di NTB	Komisi Informasi Se-Indonesia
11	22 Agustus 2023	Menerima Penghargaan dari Kantor Wilayan Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat	Tamu Undangan Kantor Wilayan Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Barat
12	31 Agustus 2023	Menghadiri Undangan Rakor KPU Provinsi Jawa Barat	Tamu Undangan KPU Provinsi Jawa Barat
13	1 September 2023	Menghadiri Undangan Malam Anugerah KPID Provinsi Jawa Barat Ke-16 di Sumedang	Tamu Undangan KPID Provinsi Jawa Barat
14	5 September 2023	Menghadiri Undangan Sertijab dan Malam Refleksi Gubernur Jawa Barat Masa Bakti 2018-2023	Tamu Undangan Gubernur Provinsi Jawa Barat
15	15 September 2023	Menghadiri Undangan Launching Buku IKIP Tahun 2023	Komisi Informasi Se-Indonesia
16	16-18 Oktober 2023	Menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis ke-12	Komisi Informasi Se-Indonesia
17	31 Oktober 2023	Menghadiri Undangan Deklarasi Damai Pemilu 2024	Kepolisian Daerah Sumedang
18	6 November 2023	Menghadiri Undangan FGD Komisi Informasi Pusat “Keterbukaan Informasi Publik Ciptakan Pemilu”	Tamu Undangan Komisi Informasi, Bawaslu, LSM

- **Peningkatan Kapasitas SDM Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan peningkatan kapasitas terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) baik Komisioner maupun Asisten di Lembaga Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Bimbingan Teknis Komisi Informasi pada Tahun 2023 ini masih tetap fokus kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi agar administasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi dapat lebih diperketat lagi, mengingat Permohonan Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada Januari hingga Bulan Oktober Tahun 2023 ini sebanyak 146 permohonan.

Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang telah dilakukan oleh SDM di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 24
Kegiatan Peningkatan Kapasitas

No	Tanggal	Peningkatan Kapasitas	Peserta
1	28 Februari – 3 Maret 2023	Bimbingan Teknis Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat di DI Yogyakarta	10 Pokja Daerah Provinsi
2	12 – 16 Maret 2023	Pelatihan Mediator yang diadakan oleh Pusat Mediasi UGM di DI Yogyakarta	Komisioner dan Asisten

- **Kerjasama dengan Lembaga Lain**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terus membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa *stakeholder*, antara lain melakukan *MoU* dan koordinasi kelembagaan dengan berbagai pihak, sesuai dengan yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 25
Kerjasama Komisi Informasi Tahun 2023

No	MoU Kerjasama	Tema Kerjasama
1	MoU Pusat Mediasi UGM dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Memperkuat kerja sama di bidang Sumberdaya Manusia (SDM)
2	MoU Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat	Kolaborasi dalam Mengawal Keterbukaan Informasi
3	MoU Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Kabupaten Garut	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
4	MoU Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPNV) Jakarta	Kolaborasi dalam Mengawal Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Tabel 26, Komisi Informasi hanya bekerjasama dengan 4 (empat) *stakeholder*, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat kenaikan yaitu, 3 (tiga) *stakeholder* yang melakukan kerjasama.

- **Pencapaian Target Bidang Kelembagaan**

Bidang Kelembagaan sudah melakukan 3 (tiga) kegiatan utama pada Bidang Kelembagaan, yakni, koordinasi penguatan kelembagaan, kerjasama dengan *stakeholder*, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi Komisioner dan Asisten di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Sejak Bulan Januari hingga Bulan November Tahun 2023 ini, Komisi Informasi sudah bersinergi dengan Komisi Informasi Provinsi lain dengan melakukan koordinasi terkait penguatan kelembagaan melalui kunjungan ke Komisi Informasi Daerah dan Provinsi

lain, maupun kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi lain ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Bidang Kelembagaan juga sudah melakukan kerjasama dengan *stakeholder* dan peningkatan kapasitas terhadap Komisioner dan Asisten di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Adapun target yang belum tercapai secara optimal adalah dukungan pengadaan sarana dan administrasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang belum sesuai dengan target, seperti pengadaan gedung kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang ramah difabel, pengadaan database digital, peningkatan kapasitas dan kapabilitas Komisioner, Petugas Kepaniteraan, dan Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Bidang

Asistensi dan PPID

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lahirnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi didasarkan pada Ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Bidang Asistensi dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dibentuk pada Tahun 2021, melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Keputusan tersebut mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah pada Tahun 2022 melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Jawa Barat.



Foto. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menjadi Narasumber pada Kegiatan Rapat Korordinasi Penguatan PPID di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Asistensi dan PPID dibentuk untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sebagai pengelola informasi publik secara baik dan efisien, serta meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Informasi Jawa Barat sebagaimana dijelaskan pada UU KIP. juga menyusun kebijakan program peningkatan kapasitas PPID di lingkungan Badan Publik di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga tertuang dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Tugas dari PPID di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yakni merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan bidang-bidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Fungsi dari PPID sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi publik dari bidang-bidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- b. Penyimpanan Informasi publik yang diperoleh dari bidang-bidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- c. Pelaksanaan asistensi informasi publik yang terbuka maupun dikecualikan bagi Badan Publik di Provinsi Jawa Barat

Selain itu, PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pun telah memuktahirkan Daftar Informasi Publik (DIP) melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat dengan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

• Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam kurun waktu Bulan Januari hingga Bulan Oktober Tahun 2023, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah menerima sebanyak 22 permohonan informasi. Berikut rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik di Komisi Informasi:

Tabel 26
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Penyelesaian		
			≤ 10 Hari	10 Hari+ 7 Hari	≥ 10 Hari
1	Januari	3	3	-	-
2	Februari	2	2	-	-
3	Maret	1	1	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	3	3	-	-
6	Juni	2	2	-	-
7	Juli	2	2	-	-
8	Agustus	5	4	-	1
9	September	3	3	-	-
10	Oktober	1	1	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
Jumlah Permohonan		22			

Pemohon Informasi Publik dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu Individu atau perseorangan, kelompok orang, dan Badan Hukum. Namun dari 22 permohonan informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Permohonan informasi tersebut diajukan oleh individu atau yang mewakili Pemohon atau Termohon pada Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Seluruh informasi yang dimohonkan pada permohonan informasi publik tersebut adalah berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terutama yang memohon dokumentasi berupa foto dan video transkrip rekaman sidang penyelesaian sengketa informasi publik.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

Informasi Publik mengatur bahwa PPID wajib memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan tersebut diterima. Pada hal ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat harus menjawab sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Jika dilihat dari tabel terkait Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023, terdapat rekapitulasi permohonan informasi yang ditanggapi. Dari 22 permohonan informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, 100% permohonan informasi ditanggapi oleh Komisi Informasi. Sebanyak 21 permohonan dijawab dalam jangka waktu pemenuhan paling lama dalam 10 hari kerja, namun terdapat 1 permohonan informasi yang dijawab lebih dari 10 hari seperti yang dijelaskan pada tabel di atas.

Namun Pemohon Informasi berhak mengajukan Keberatan apabila terdapat alasan seperti yang dijelaskan pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, sebagai berikut:

- a. penolakan atas permohonan informasi publik sesuai dengan perundang-undangan;
- b. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
- c. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- d. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
- e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan
- f. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

Tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat pengajuan Keberatan walaupun permohonan informasi sudah seluruhnya ditanggapi. Tahun 2023 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat hanya menerima 1 (satu) keberatan dan telah ditanggapi dengan baik.

Kemudian untuk tahun 2023 ini, tidak ada satupun keberatan yang masuk proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Namun, proses

penyelesaian sengketa informasi publik pada permohonan informasi publik tahun 2022 lalu, yaitu dengan Pemohon Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, hingga saat ini belum selesai. Sampai pada saat ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masih menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung terkait perkara tersebut.

Selain kegiatan pelayanan informasi publik, PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga aktif dalam publikasi pengumuman informasi publik melalui website dan media sosial seperti, *Twitter*, *Facebook*, dan *Instagram*.

- **Kegiatan Asistensi Penerapan Keterbukaan Informasi**

Kegiatan atau program Asistensi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID di Badan Publik Jawa Barat dengan tujuan untuk melakukan pendampingan dan/atau membantu PPID/PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas PPID/PPID Pelaksana dalam melaksanakan penerapan Keterbukaan Informasi Publik dan melakukan pendampingan peningkatan kapasitas dilakukan terhadap SDM (Sumber Daya Manusia) pada Badan Publik dengan melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik sebagai narasumber. Pada tahun 2023, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menjadi narasumber dan mengikuti kegiatan terkait kegiatan asistensi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Kegiatan Asistensi Penerapan Keterbukaan Informasi

No	Tanggal	Kegiatan	Peserta
1	18 Januari 2023	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	OPD Provinsi Jawa Barat
2	26 Januari 2023	Kegiatan optimalisasi dan peningkatan kapasitas PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	OPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta

3	26 Januari 2023	Rapat Koordinasi PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4	6 Februari 2023	Asistensi Penyusunan Daftar Informasi Publik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
	14 Februari 2023	Kegiatan Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID dalam Pengelolaan Informasi Publik yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Bawaslu Provinsi Jawa Barat
5	26 Februari 2023	Asistensi Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
6	2-3 Maret 2023	Rapat Koordinasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Pemerintah Kota Bandung
7	7-8 Maret 2023	Rapat Koordinasi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi	Pemerintah Kabupaten Bekasi
	15 Mei 2023	Kegiatan Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID dalam Pengelolaan Informasi Publik yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang	Staff Bawaslu Kabupaten Karawang
	1 Agustus 2023	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan Publikasi dalam mendukung Informasi Pariwisata di Jawa Barat yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	Staff Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
8	4 Agustus 2023	Asistensi Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Subang	Pemerintah Kabupaten Subang
	10 Agustus 2023	Kegiatan Bimbingan Teknis PPID dan Sosialisasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Lingkungan	Staff Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

		Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	
	5 September 2023	Kegiatan Seminar Keterbukaan Informasi Publik Pengelolaan Anggaran Bantuan Pemerintah di SMA & SMK Dalam Bingkai Hukum Positif yang diadakan oleh LSM Penjara	Staff LSM Penjara
	29 Oktober 2023	Sosialisasi dan Implementasi Produk Hukum Pengawasan Serta Penegakan Hukum yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Tamu Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

- **Pencapaian Target Bidang Asistensi dan PPID**

Pencapaian kegiatan Asistensi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik belum sepenuhnya menjangkau seluruh Badan Publik di Jawa Barat. Masih sebagian kecil Badan Publik yang memanfaatkan program/kegiatan ini dalam peningkatan kapasitas PPID/PPID Pelaksana di lingkungan Badan Publik masing-masing dikarenakan sebagian Badan Publik belum memiliki anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Namun, kegiatan Asistensi yang telah dilakukan kepada sebagian Badan Publik telah berhasil memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait penerapan Keterbukaan Informasi Publik yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2023, Badan Publik yang telah diasistensi sebagian besar mengalami peningkatan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dari hasil sementara MONEV tahun 2023 ini.

Pencapaian bidang PPID pada tahun 2023 yaitu pemenuhan jumlah permohonan informasi tepat waktu, dengan rata-rata waktu pemenuhan paling lama dalam 10 hari kerja dan pemenuhan informasi yang wajib diumumkan melalui laman *website* dan media sosial.

Selain itu, PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tahun 2023 juga telah memuktahirkan DIP (Daftar Informasi Publik) seperti informasi setiap saat, informasi serta merta, informasi berkala. Yang masih dalam proses adalah penetapan informasi yang dikecualikan yang hingga laporan ini dibuat masih berupa draft dan belum disahkan serta belum dilaksanakannya uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.

Penutup

Demikianlah Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Komisi Informasi Pusat, serta kepada seluruh rakyat Jawa Barat.

Semoga Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan kinerja Komisi Informasi Jawa Barat pada tahun berikutnya, evaluasi implementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat, dan umumnya pada siapa saja yang memerlukan.

Ketua, Wakil Ketua, para Komisioner, para Panitera, Tenaga Ahli, para Koordinator Assisten Ahli, Para Asisten Ahli, dan seluruh staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu optimalnya kinerja Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2023, sekaligus memohon maaf jika masih terdapat kekurangan.

Bandung, November 2023

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi



Foto. Suasana Persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Foto. Suasana Persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Foto. Suasana Persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Foto. Suasana Persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di luar Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Foto. Kegiatan Mediasi di Kantor Komisi Informasi



Foto. Kegiatan Mediasi di Kantor Komisi Informasi



Foto. Rapat Internal Satu jam sebelum sidang untuk melakukan pembahasan terkait Sengketa yang akan disidangkan



Foto. Kegiatan Pemeriksaan Setempat ke Badan Publik yang bersengketa

Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi

- Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik



Foto. Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi



Foto. Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi

- Publikasi Media TV dan Radio



Foto. Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi Publik Media Radio



Foto. Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi Publik Media Radio



Foto. Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi Publik Media TV

- **Monitoring dan Evaluasi (Money) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik**



Foto. Kegiatan Visitasi Badan Pubik di Kabupaten dan Kota Money Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Visitasi Badan Pubik di Kabupaten dan Kota Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Visitasi Badan Pubik di Kabupaten dan Kota Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Visitasi Badan Pubik di Kabupaten dan Kota Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Visitasi Badan Publik di Kabupaten dan Kota
Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Persentasi badan Publik OPD
Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Persentasi badan Publik OPD
Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Persentasi badan Pubik OPD
Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Persentasi badan Pubik OPD
Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Persentasi badan Pubik OPD
Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Persentasi badan Pubik Instansi Vertikal
Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Persentasi badan Pubik Instansi Vertikal
Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Foto. Kegiatan Persentasi badan Pubik Instansi Vertikal
Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

- survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Jawa Barat



Foto. Kegiatan Launching Buku IKIP versi Braile dan Audio



Foto. Kegiatan NAC (*National Assesment Council*) Forum

- Kegiatan Apresiasi Desa



Foto. Kegiatan Rapat bersama DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Provinsi Jawa Barat Terkait pembahasan Apresiasi Desa



Foto. Kegiatan Audiensi dan Asesment Apresiasi Desa



Foto. Kegiatan Fasilitasi Pengisian SAQ kepada Desa Terpilih
(Desa Cinta Kabupaten Garut, Desa Taringgul Tonggoh
Kabupaten Purwakarta, Desa Kutamanggu Kabupaten Majalengka)

Bidang Kelembagaan

- Penguatan Kelembagaan



Foto. Audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat



Foto. Audiensi dengan PTUN Bandung



Foto. Kunjungan Kelembagaan DPRD Provinsi Banten



Foto. Kunjungan Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Riau



Foto. Kunjungan Kelembagaan Komisi Informasi Pusat dan Diskominfo Jabar



Foto. Penyerahan Piala Monev 2022 ke Pemerintah Kota Bandung



Foto. Penyerahan Piala Monev 2022 ke Pemerintah Kota Cirebon



Foto. Penyerahan Piala Monev 2022 ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat



Foto. Penyerahan Piala Monev 2022 ke Pemerintah Kabupaten Bogor



Foto. Penyerahan Piala Monev 2022 ke Pemerintah Kota Tasikmalaya



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Diskominfo Provinsi Jawa Timur



Foto. Penyerahan Piala Monev 2022 ke Pemerintah Kabupaten Cirebon



Foto. Penyerahan Piala Monev 2022 ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar



Foto. Penyerahan Piala Monev 2022 ke Pemerintah Kabupaten Sumedang



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Diskominfo Kabupaten Karawang



Foto. Penyerahan Piala Money 2022 ke Dinas Pendidikan Jabar



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur



Foto. Penyerahan Piala Monev 2022 ke Pemerintah Kabupaten Karawang



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke DPRD Provinsi Jawa Barat



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Jimly School Of Law And Government



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Badang Penghubung Jabar

- Peningkatan Kapasitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Foto. Bimbingan Teknis IKIP 2023 Komisi Informasi Pusat



Foto. Pelatihan Mediator di Pusat Mediasi UGM Yogyakarta



Foto. Pelatihan Mediator di Pusat Mediasi UGM Yogyakarta



Foto. Pelatihan Mediator di Pusat Mediasi UGM Yogyakarta

- Kerjasama dengan Lembaga Lain



Foto. MoU Komisi Informasi Jabar dengan Pusat Mediasi UGM Yogyakarta



Foto. MoU Komisi Informasi Jabar dengan KANWILKUMHAM Jabar

- Kegiatan Undangan Kelembagaan



Foto. Menghadiri Undangan Forum Diskominfo Se-Jawa Barat



Foto. Menghadiri Undangan TINARBUKA Komisi Informasi Pusat



Foto. Menghadiri Undangan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN)



Foto. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Nasional ke-13 di NTB



Foto. Kegiatan Menerima Penghargaan dari KANWILKUMHAM Jabar



Foto. Menghadiri Undangan Rakor KPU Jabar



Foto. Menghadiri Undangan Malam Refleksi Gubernur Jawa Barat

Bidang Asistensi dan PPID



Foto. Rapat Koordinasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung



Foto. Sosialisasi dan Implementasi Produk Hukum Pengawasan Serta Penegakan Hukum yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Foto. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan Publikasi dalam mendukung Informasi Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat



Foto. Kegiatan Seminar Keterbukaan Informasi Publik Pengelolaan Anggaran Bantuan Pemerintah di SMA & SMK Dalam Bingkai Hukum Positif yang diadakan oleh LSM Penjara



Foto. Kegiatan Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID dalam Pengelolaan Informasi Publik yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Foto. Menerima Permohonan Informasi

LAPORAN KINERJA TAHUN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

2023

BHINNEKA TUNGGAL IKA



Jl. Turangga No.25,
Lkr. Sel., Kec. Lengkong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40263



(022) 73511656



kipjabar@gmail.com



www.komisinformasi.jabarprov.go.id